

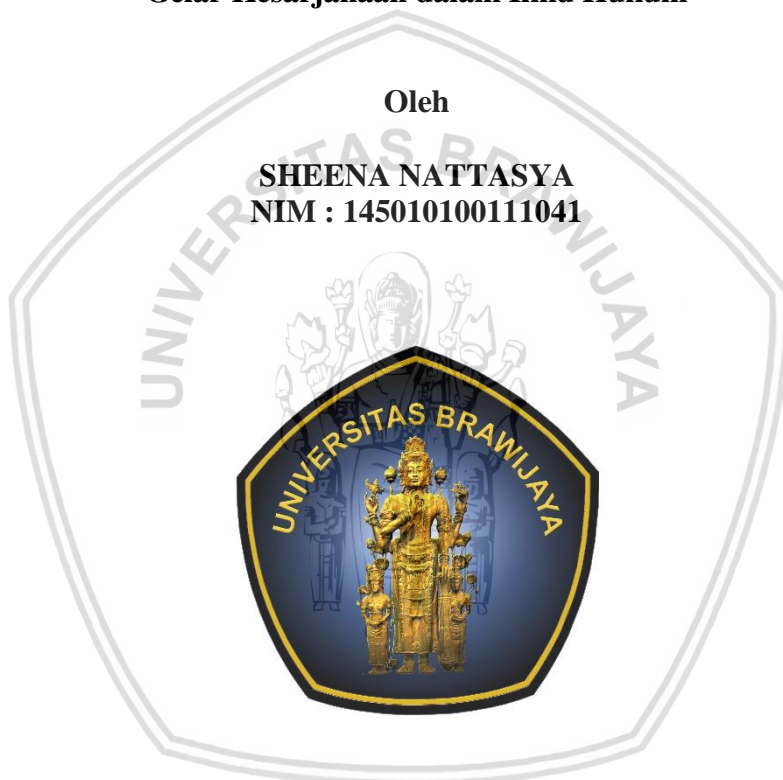
**BATASAN PERBUATAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN
PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG TERMASUK PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**
(Analisa Pasal 36 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan PKPU)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum**

Oleh

SHEENA NATTASYA
NIM : 145010100111041



**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2018**

HALAMAN PENGESAHAN**SKRIPSI****BATASAN PERBUATAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN
PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG TERMASUK PERBUATAN
MELAWAN HUKUM**

SHEENA NATTASYA
NIM : 145010100111041

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 11 Juli 2018 dan disahkan pada tanggal: Juli 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Budi Santoso, S.H, LLM
NIP. 19720622 200501 1 002

Ranitya Ganindha, S.H, M.H
NIP. 198806302014043001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian
Hukum Perdata

Dr. Rachmad Syafa'at, S.H, M.Si
NIP. 196208051988021001

Dr. Budi Santoso, S.H, LLM
NIP. 19720622 200501 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar keserjanaan saya.

Malang, Juli 2018

Yang menyatakan,

Sheena Nattasya
NIM : 145010100111041



KATA PENGANTAR

Segala puji peneliti panjatkan hanya kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi dengan judul Batasan Perbuatan Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit yang Termasuk Perbuatan Melawan Hukum. Untuk itu Peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama pengerjaan skripsi ini.

Terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LL.M selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan selaku pembimbing utama peneliti yang telah memberi banyak ilmu, arahan dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Ibu Ranitya Ganindha, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberi peneliti banyak masukan, arahan dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Orang tua terutama Mama yang selalu mendoakan peneliti tiada hentinya , yang selalu memberi dorongan dan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk segala dukungan dalam hal apapun.
5. Kakakku, Kak Yasmin Zahira dan Kak Faizal Firass serta Adikku Muhammad Farhan yang telah memberi dukungan serta menjadi motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Sahabatku sejak semester 1, Yessi Marendra, Shinta Adhania, Tamara Soniya dan Violeta Indonesiani yang telah menemani selama proses pembelajaran di fakultas hukum selama hampir 4 tahun ini, semoga kita sukses bersama kelak.
7. Sahabatku semenjak SMA, Bunga Adelia dan Andyani Surya Putri sebagai teman yang selalu memotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan selalu ada dalam suka maupun duka.
8. Serta segala pihak tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberi motivasi dan semangat dalam menyelesaikan program studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis yakin skripsi yang sederhana ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberi rahmat dan karunia-Nya kepada semuanya, semoga dilancarkan segala urusan dan rencana kedepannya sehingga mendapat Ridha dari Allah SWT.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Juli 2018

Sheena Nattasya



RINGKASAN

Sheena Nattasya, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, BATASAN PERBUATAN KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT YANG TERMASUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM, Dr. Budi Santoso, S.H, LLM, Ranitya Ganindha S.H, M.H.

Pada penelitian ini peneliti akan membahas mengenai batasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam suatu kasus, yaitu putusan Nomor 658K/Pdt.Sus-Pailit/2014 kurator digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan penggugat yaitu kreditor. Hakim memutuskan bahwa kurator telah melakukan perbuatan melawan hukum. Namun dalam tingkat Peninjauan Kembali 78 PK / Pdt.Sus.Pailit/2015 kurator dikatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak adanya batasan perbuatan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menyebabkan inkonsistensi pada putusan hakim.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah apakah batasan perbuatan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum

Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan analogi. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal dan analogi.

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan : Kasus 658 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 dan 78PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 memiliki gugatan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator dengan dasar Pemutusan perjanjian timbal balik secara sepihak antara PT PWS (dalam pailit) dan PT Takara Golf (sebagai penggugat). Karena batasan terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator tidak dirumuskan dalam UUK maka dapat ditinjau dari beberapa teori, yang pertama adalah berdasar pasal 1365 KUHPerdata, yang kedua adalah berdasarkan pendapat Munir Fuady, dan teori yang ketiga adalah teori yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas. Batasan terhadap perbuatan kurator yang melanggar hukum juga dapat di analogikan dengan doktrin dalam Hukum Perusahaan yaitu *ultravires*. Dalam pasal 97 ayat (5) UUPT dapat dikatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas setiap kerugian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5). Pasal tersebut dapat ditafsirkan secara *a contrario* untuk membandingkan dengan tindakan perseroan yang dapat dikatakan sebagai *ultravires* dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam

kasus diatas dan berdasarkan analisa yang dilakukan penulis, terlihat bahwa dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan 658 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014 dalam memutus kurator telah melakukan perbuatan hukum dapat dibenarkan ditinjau dari pasal 36 ayat bahwa kurator tidak berhak melakukan pemutusan hubungan perjanjian timbal balik karena dalam hal ini perjanjian telah selesai yaitu dengan telah di bayarkannya uang sewa oleh PT Takara Golf Ressort. Kurator bertindak sebagai pengganti direksi jika suatu perusahaan mengalami pailit. Sehingga untuk dapat menilai tindakan kurator yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, pendapat dari Munir Fuady dan teori *Ultravires* sangat sesuai untuk digunakan sebagai tolak ukur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator.



SUMMARY

Sheena Nattasya, *Business Civil Law, Faculty of Law Brawijaya University, LIMITATION OF CURRENT RULES IN THE MANAGING AND ORDERING OF PAILITES INCLUDING THE ACT AGAINST THE LAW*, Dr. Budi Santoso, S.H, LL.M, Ranitya Ganindha S.H, M.H.

In this study, the researcher will discuss about the limitation of the act against the law done by the curator in the management and ordering of the bankruptcy property. In one case, the verdict Number 658K / Pdt.Sus-Pailit / 2014 curator was sued for committing an act against the law for harming the plaintiff, the creditor. The judge decided that the curator had committed an act against the law. But in the Level of Review 78 PK / Pdt.Sus.Pailit / 2015 the curator is said to have committed no action against the law. The absence of limitations of curators' actions in managing and securing bankruptcy treasures that can be categorized as unlawful causes an inconsistency in the judge's decision.

Based on the orientation, the legal issues to be discussed in this research is what is the limits of curator's action in managing and ordering bankruptcy property so that it can be categorized as an act against the law

To answer the issues, this normative legal research use the legislation approach, case approach and analogical approach. Legal material that related with the issues are obtained through library research. Legal materials that has been obtained are analyzed by systematic, grammatical and analogical method.

Based on the study, it can be concluded that : Case 658 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 and 78PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 have a law suit about act against the law that committed by the curator based on the termination of a reciprocal agreements unilaterally between PT PWS (in bankrupt) and PT Takara Golf Ressort (as a plaintiff). Since the limitation of act against the law that done by curator is not formulated in Bankruptcy Act, it can be observed by some theories, the first is based on article 1365 on Civil Code, second is based on Munir Fuady's opinion and the third theories is relating to Limited Liability of company. The limitation of curator's act that against the law can also be analogous to the doctrine of Company Law, Ultravires. In the article 97 paragraph (5) Corporation Act said that the member of the board of directors can not be accountable for any losses as referred to in paragraph (5). The article can be interpreted in a contrario to compare with the action of the company which can be categorized as an ultravires and can be accounted for. In above case and based the anylisis done by the aouter, it can be seen that the consideration of the judges in the decision of 658 PK / Pdt.Sus-Pailit / 2014 in deciding the curator has done legal acts justified in article 36 paragraph that the curator has no right to terminate the agreement reciprocity because in this case the agreement has been completed that is by paying the rent by PT Takara Golf Ressort. The curator

acts as a substitute for directors if a company goes bankrupt. So as to be able to judge the actions of the curator who can be said to be against the law, Munir Fuady's opinion and Ultravires theory are well suited to be used as a benchmark against unlawful acts by curators.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa negara Asia termasuk negara Indonesia pada tahun 1997 telah menyebabkan kesulitan yang sangat besar terhadap perekonomian negara.¹ Persoalan utang piutang menjadi masalah utama bagi para pengusaha di Indonesia.

Kepailitan adalah salah satu jalan keluar untuk keluar dari utang piutang yang dihadapi oleh seorang debitor pada saat debitor tersebut sudah tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membayar utang-utang kepada para kreditornya.²

Secara sederhana kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan atas semua aset debitor yang dimasukkan ke dalam permohonan pailit.³ Menurut pasal 2 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Putusan dalam kepailitan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum⁴. Hal ini biasa kita

¹ Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

² M. Hadi Shubhan, **Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan)**, Prenada Media Group, Surabaya, 2007, hlm.2

³ Peter Mahmud Marzuki, **Hukum kepailitan menyongsong Era Global**, Makalah Semiloka Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH-UNDIP-ELIPS

⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 8 ayat (7)

kenal dengan putusan serta merta atau *Uitvoerbaar bij voorraad* hal ini tercantum pada pasal 16 UUK yang berbunyi :

- “1. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
2. Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor”⁵

Setelah putusan pailit dijatuhkan maka yang dijatuhi pailit langsung saja kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan juga penguasaan terhadap harta kekayaan nya. Konsekuensi dari putusan kepailitan yang bersifat serta merta atau *Uitvoerbaar bij voorraad* adalah segenap harta kekayaannya akan menjadi harta pailit.

Kurator yang ditetapkan dalam putusan pailit akan segera melakukan tugasnya berupa mengurus dan menguasai harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas meskipun saja telah diajukan upaya hukum baik kasasi maupun PK terhadap putusan tersebut. Hal ini menyebabkan apa pun yang dilakukan kurator dianggap sah menurut hukum.⁶

Pengurusan yang dilakukan kurator maksudnya adalah mencatat harta pailit, menemukannya, mempertahankan nilainya, mengamankan dan inventarisasi; selain itu juga melakukan rapat kreditor; melakukan tindakan hukum ke pengadilan; meneruskan dan menghentikan hubungan hukum debitor; membuat laporan keadaan pailit; mengalihkan aset untuk meningkatkan harta pailit; pencocokan dan verifikasi utang; urusan

⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 16

⁶ M. Hadi Subhan, *Op.Cit*, hlm.134

perdamaian; dan melanjutkan dan menghentikan usaha. Dalam kegiatan pengurusan harta pailit kurator harus memastikan barang yang akan disita bisa diidentifikasi, dikelola dan dipertahankan atau dikembangkan nilainya, agar dapat dijual dan hasilnya akan dibagikan kepada kreditor.⁷ Dalam pengurusan harta pailit kurator juga harus melindungi harta debitor pailit dan berusaha untuk mempertahankan nilai harta pailit tersebut. Sedangkan pemberesan harta pailit adalah melakukan penjualan atas harta pailit; pembagian harta pailit; berakhirnya kepailitan serta lelang. Dalam rangka melaksanakan tugasnya, menurut pasal 69 ayat (2) UUK:

- “1. Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
2. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit”⁸

Kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki kurator dapat malah merugikan pihak yang diputus pailit maupun para kreditor selama menjalankan tugasnya dalam melakukan pengurusan dan juga pemberesan harta pailit. Menurut sifat dari kurator, ia dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Maka dari itu, kurator juga bertanggung jawab karena kerugian yang diderita oleh para pihak ketiga.⁹

Terhadap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan kurator, tercantum dalam Pasal 72 UUK yang berbunyi:

⁷<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh> Diakses pada 1 Februari 2018, pukul 10:10 WIB

⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 69 ayat (2)

⁹ Imran Nating, **Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hlm. 115

“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”

Pernah terjadi suatu kasus mengenai kelalaian kurator terhadap harta benda milik debitor pailit yang menyebabkan kerugian yang diderita oleh para kreditor pailit. Kasus ini merujuk pada Putusan Nomor 658 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014, dimana dalam kasus itu, pada mulanya sang Penggugat yaitu PT Takara Golf Resort adalah penyewa sebidang tanah yang berada di Jawa Barat berdasarkan Perjanjian Sewa-menyewa dengan Hak Pengelolaan No. 100 pada tanggal 20 Oktober 1993 yang selanjutnya disebut sebagai obyek sewa. Obyek sewa tersebut dahulu adalah aset milik PT Panca Wiratama sakti (PT PWS).

Penggugat ditunjuk dan berhak mengelola obyek sewa dengan jangka waktu sewa selama masa berlakunya Hak Guna Bangunan atas obyek sewa, yaitu hingga 6 April 2018. Obyek sewa telah menjadi Lahan Lapangan Golf dan segala fasilitas atau bangunan yang berada di lapangan golf adalah milik penggugat hingga berakhirnya masa perjanjian sewa menyewa. Saat perjanjian berakhir seharusnya PT PWS memperpanjang masa sewanya. Namun PT PWS diputus dalam keadaan pailit berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali Nomor 135PK/Pdt.Sus/2012, sehingga segala pengurusan hartanya beralih dari Debitor pailit yaitu PT PWS kepada Tim Kurator PT Panca Wiratama Sakti yang merupakan Tergugat.

Tergugat selaku pengurus harta pailit telah mengajukan surat untuk Pengakhiran perjanjian sewa menyewa tanah kepada penggugat atau somasi I.

Tergugat menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut akan berakhir pada 3 Agustus 2014 namun tergugat meminta penggugat untuk segera memberhentikan segala aktivitas pengelolaan Takara Golf Ressor dan segera menyerahkan segala sarana dan juga fasilitas kepada tergugat. Kemudian tergugat kembali mengajukan surat Pemberitahuan Ulang mengenai surat Peringatan/Somasi I.

Berdasar Pasal 36 ayat (3) UUK , Kurator dapat melakukan penghentian atau pengakhiran perjanjian timbal balik yang dilakukan oleh debitor pailit. Namun pihak lain yang melakukan perjanjian dengan debitor pailit akan dapat menuntut penggantian ganti rugi dari pengakhiran perjanjian tersebut dan akan diperlakukan sebagai Kreditor Konkuren.¹⁰

Menurut penggugat, tindakan tergugat dalam mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa secara sepihak dengan surat somasi I dan surat pemberitahuan ulang adalah bertentangan dengan hukum. Dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak (dalam hal ini adalah PT PWS yang diwakili tergugat) telah melalaikan kewajibannya maka permohonan untuk melakukan pembatalan perjanjian sewa-menyewa harus dilakukan melalui pengadilan. Selain itu penghentian perjanjian tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kurator dan menyebabkan turunnya nilai asset debitor pailit.

Penggugat mengajukan gugatan bahwa tindakan kurator diatas telah termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum menurut 1365 BW. Yang

¹⁰ Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pasal 36 ayat (3)

sesuai dengan unsur-unsurnya yaitu; adanya perbuatan; perbuatan tersebut telah melawan hukum; adanya kerugian yang diderita penggugat berupa Hutang kepada Kreditur penggugat, sisa sewa 4 tahun lagi dan ganti rugi kepada 310 member Penggugat; dan adanya unsur kesalahan (*schuld*).

Berdasarkan putusan kasasi 658 K/Pdt.Sus-Pailit/2014, Mahkamah Agung memutuskan untuk mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan tindakan berupa perbuatan melawan hukum.

Tim Kurator PT PWS telah mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan alasan tindakan Kurator atau tergugat dengan melakukan pengakhiran perjanjian sewa menyewa yang masih berjalan dan belum habis masa sewanya atas tanah PT PWS selaku pemilik dapat dibenarkan dan bukan termasuk Perbuatan Melawan Hukum.

Putusan dari Mahkamah Agung berdasar putusan 78-PK/Pdt.Sus.Pailit/2015 adalah menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya sehingga Kurator / Tergugat dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Kasus tersebut membuktikan bahwa besarnya kewenangan yang diberikan oleh UU Kepailitan kepada Kurator dalam melakukan pemberesan dan juga pengelolaan harta pailit, dapat menyebabkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang demi menguntungkan pihak Kurator sendiri

ataupun salah satu dari pihak Kreditor yang bersangkutan serta dapat pula menimbulkan perbuatan melawan hukum.¹¹

Pasal 1365 KUHPerdato menyatakan bahwa :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”¹²

Sedangkan ketentuan pasal selanjutnya, yaitu pasal 1366 KUHPerdato menyatakan bahwa:

“ Setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”¹³

Menurut Jerry Hoff tanggung jawab kurator tidaklah berat dan bisa saja disamakan dengan ketentuan yang diatur dala pasal 1365 KUHPerdato (Perbuatan Melawan Hukum). Menurut sifatnya itu kurator dapat melakukan perbuatan hukum.¹⁴

Putusan Nomor 658 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014 dan putusan 78-PK/Pdt.Sus.Pailit/2015 mengenai perbuatan melawan hukum yang oleh kurator bertentangan satu sama lain, ini dikarenakan dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tidak diatur mengenai batasan tanggung jawab kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tidak ada satupun pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator.

¹¹ Abdul R. Saliman. **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan**, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2005, hlm. 122

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1366

¹⁴ Imran Nating, *Op.Cit*, hlm. 115

Dalam hal ini masalah yang timbul adalah, apa batasan bagi seorang kurator bagi perbuatan hukum yang ia buat sejak seorang debitor diputus pailit sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum.

Tabel 1.1



No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2009	Galuh Indraswari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	“Peranan Kurator Dalam Penanganan Perkara Kepailitan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”	<p>“1. Bagaimanakah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kewenangan kepada kurator untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien?</p> <p>2. Bagaimanakah tugas kurator setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga?</p> <p>3. Kendala-kendala yuridis apakah yang dihadapi oleh kurator dalam mengurus harta pailit?”</p>	Penelitian terdahulu mengenai penerapan dan hambatan dalam pelaksanaan kewenangan kurator yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004
2	2015	Sriti Hesti Astiti, Universitas Airlangga	“Pertanggungjawaban Pidana Kurator Berdasarkan Prinsip Independensi Menurut Hukum Kepailitan”	<p>1. Bagaimana ratio legis sanksi pidana terhadap kurator yang tidak independen dalam UU Kepailitan?</p> <p>2. Bagaimana pertanggungjawabannya pidana kurator dalam kepailitan berdasarkan prinsip independensi?</p>	peneliti terdahulu menitik beratkan pada frasa interpendensi sedangkan peneliti menitik beratkan pada batasan pertanggungjawaban
3	2016	Moch Zulkarnain Al Mufti, Universitas Islam Indonesia	“Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar”	Bagaimana tanggung jawab kurator dalam penjualan harta pailit yang dibawah harga pasar ?	Peneliti terdahulu hanya menitik beratkan pada pertanggungjawaban jika kurator menjual dibawah harga pasar

Berdasarkan ketiga penelitian diatas, penelitian pertama menitik beratkan pada penerapan dan hambatan dalam pelaksanaan kewenangan kurator, penelitian ini bersifat empiris. Penelitian kedua menitik beratkan pada batasan pertanggung jawaban dari sisi pidana dan dikaitkan dengan prinsip independensi yang ada pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Penelitian ketiga menitik beratkan pertanggung jawaban seorang kurator dalam melakukan penjualan harta pailit dalam lelang yang dibawah harga pasar. Sedangkan belum ada yang membahas mengenai batasan perbuatan kurator selama ia melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul skripsi **“Batasan Perbuatan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit yang Termasuk Perbuatan Melawan Hukum”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apa batasan perbuatan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis batasan perbuatan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum perdata pada umumnya dan khususnya perdata bisnis terkait dengan dengan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, terutama mengenai batasan perbuatan kurator dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit yang termasuk perbuatan melawan hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan pemerintah dalam menetapkan atau mengubah kebijakan/ regulasi mengenai Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

b. Bagi Kreditur dan Debitor dalam Kepailitan

Diharapkan dapat memberikan informasi ataupun pedoman bagi Kreditur yang terlibat dalam perkara kepailitan terutama kepada kreditur atau debitor yang ingin menggugat atau memperkarakan kurator.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menjadi masukan dan tambahan informasi bagi masyarakat yang akan melakukan sidang kepailitan.

d. Bagi Hakim Pengawas

Diharapkan dapat menjadi masukan dalam putusan apabila dalam mengadili perkara kepailitan yang putusan tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang maupun hukum yang berlaku. Sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan uraian sistematis, hal tersebut sangat berguna untuk memudahkan penulis dalam menyusun dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah yang melatar belakangi ditulisnya skripsi ini beserta rumusan masalah, tujuan dan mafaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka berisikan teori dan konsep yang berkenaan dengan ruang lingkup dalam judul di skripsi penelitian

BAB III : METODE PENELITIAN

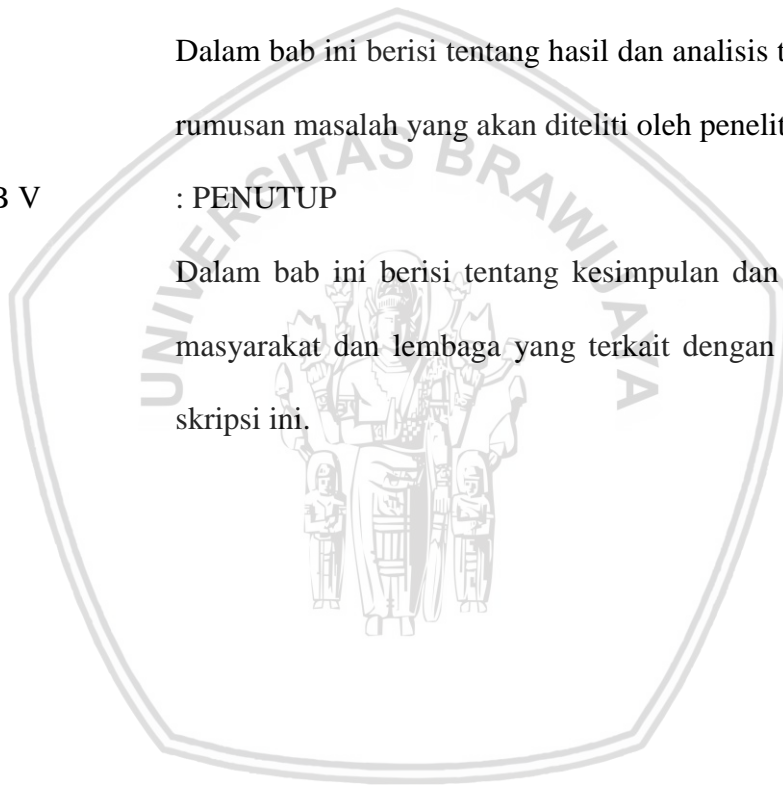
Dalam bab ini menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data atau jenis bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, definisi konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang hasil dan analisis terkait dalam rumusan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk masyarakat dan lembaga yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Umum tentang Kepailitan

Kepailitan adalah salah satu jalan keluar untuk keluar dari persoalan utang piutang yang dihadapi oleh seorang debitor pada saat debitor tersebut sudah tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membayark utang-utang kepada para kreditornya.¹⁵

1. Pengertian Kepailitan

Pengertian kepailitan secara defenitif tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, namun para sarjana memberikan definisi kepailitan dari berbagai sudut pandang.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada kreditornya.¹⁶ Sedangkan arti dari kepailitan adalah putusan pengadilan yang mengakibatkan sitaan umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.¹⁷

Penyelesaian utang haruslah dilaksanakan secara cepat dan efektif.

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk

¹⁵ M. Hadi Shubhan, **Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan)**, Prenada Media Group, Surabaya, 2007, hlm.2

¹⁶ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hlm.1

¹⁷ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hlm.1

keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu dengan menghindari:

- 1) Perselisihan antara para kreditor dengan memperebutkan harta debitor, apabila ditagih dalam waktu yang sama .
- 2) Penjualan oleh kreditor pemegang hak jaminan kebendaan atau kreditor separatis yang menjual barang milik debitor tanpa mempertimbangkan kepentingan debitor dan kreditor lain.
- 3) Terjadinya kecurangan oleh para kreditor tertentu yang menyebabkan kerugian kreditor lain
- 4) Terjadinya kecurangan oleh debitor untuk melarikan harta kekayaannya untuk melepas tanggung jawab kepada para kreditor.¹⁸

Lembaga kepailitan berfungsi untuk mencegah terjadinya eksekusi massal oleh para kreditor dan memungkinkan debitor membayar utang-utangnya secara tenang, tertib dan adil dengan cara yaitu :

- 1) Dilakukannya penjualan atas harta pailit yang ada yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitor;
- 2) Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian kreditor yang telah diperiksa sebagai kreditor yang sah masing-masing sesuai dengan:

¹⁸ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

- a. Hak Preferensinya dan
- b. Proporsional dengan hak tagihannya dibandingkan dengan besarnya hak tagihan kreditur konkuren lainnya¹⁹

Pasal 6 ayat (3) UUK menyatakan bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit dapat dikabulkan apabila terdapat nya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Yang berarti bahwa apabila telah terbukti secara sederhana bahwa debitur mempunyai lebih dari satu kreditor dan bahwa salah satu utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi debitur tidak/belum membayar utangnya tersebut. Pembuktian sederhana yang dimaksud adalah :

- a. Eksistensi dari suatu utang debitur yang dimohonkan kepailitan yang telah jatuh tempo;
- b. Eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitur yang dimohonkan kepailitan.

Menurut pasal 1 ayat (1) UUK, salah satu syarat yang harus dipenuhi ialah debitur harus mempunyai 2 (dua) kreditor atau lebih. Keharusan adanya dua kreditor yang diisyaratkan dalam UUK merupakan pelaksanaan dari ketentuan pasal 1132 KUHPerdara.²⁰

¹⁹ Rahayu Hartini, **Hukum Kepailitan**, UMM Press, Malang, hlm. 20

²⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, **Pedoman Menangani perkara kepailitan**, Raja Grafindo Press, Jakarta, 2003, hlm. 107

Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah harus adanya utang. Menurut penjelasan pasal 1 ayat (1) UUK. Utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini adalah utang pokok atau bunganya.

UUK telah memberikan definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan utang dalam Pasal 1 angka 6 yaitu :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor, baik tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”²¹

Suatu utang dikatakan jatuh dan harus dibayar jika utang tersebut sudah jatuh waktu untuk dibayar. Apabila dalam perjanjian tidak diatur ketentuan mengenai jatuh tempo nya utang, maka utang menjadi sudah waktunya untuk dibayar setelah adanya pemberitahuan tentang kelalaian yang diberikan kepada debitor.²²

2. Prosedur kepailitan

Permohonan kepailitan diajukan ke pengadilan niaga melalui panitera pengadilan niaga tersebut. Adapun yang dapat mengajukan permohonan kepailitan menurut Pasal 2 ayat (1) UUK adalah :

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 baik

²¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 1 angka 6

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238

atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.”²³

Yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah :

- a. Debitur itu sendiri;
- b. Seorang atau lebih kreditor;
- c. Kejaksaan demi kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia jika debitur adalah perusahaan berbentuk bank;
dan
- e. Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM jika debitur adalah perusahaan efek.

Permohonan kepailitan tersebut wajib diajukan melalui advokat kecuali jika pemohonnya adalah kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam dan Menteri Keuangan.

Setelah permohonan diajukan ke panitera Pengadilan Niaga, lalu didaftarkan permohonan tersebut dan dalam waktu paling lama 1 x 24 jam setelah tanggal pendaftaran panitera harus menyampaikan itu ke ketua Pengadilan Niaga dan menetapkan hari sidang.

Setelah pendaftaran tersebut telah selesai, pengadilan akan memanggil debitor pailit untuk menghadiri sidang. Pemanggilan harus dilakukan selambat-lambatnya dilakukan 7 hari sebelum diselenggarakannya sidang pemeriksaan pertama. Sedangkan putusan Pengadilan Niaga paling lambat 60 hari sejak tanggal permohonan

²³ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 2 ayat (1)

pernyataan pailit didaftarkan. Sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat (7) UUK :

“Putusan dalam kepailitan pada prinsipnya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum”²⁴

Tata cara beracara dalam kepailitan pada dasarnya sama dengan hukum acara perdata biasa, namun bedanya proses persidangan dalam kepailitan terjadi dalam waktu yang sesingkat mungkin.

Upaya hukum yang diatur dalam kepailitan berbeda dengan upaya hukum yang diatur dalam hukum acara perdata biasa. Dalam hukum acara kepailitan upaya hukum yang dikenal adalah upaya hukum kaasi dan upaya hukum peninjauan kembali, dan tidak dikenal upaya hukum banding.²⁵

3. **Harta Pailit**

Sebagaimana yang tercantum pada pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU :

“Harta Pailit meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan”²⁶

Ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata yaitu seluruh harta kekayaan debitur baik barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, di kemudian hari menjadi tanggungan (anggunan) bagi seluruh utang debitur.

²⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 8 ayat (7)

²⁵ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit*, hlm. 127

²⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 21

Harta kekayaan debitur bukan saja terbatas kepada harta kekayaan berupa barang-barang tetap, seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak. Termasuk bila terhadap barang-barang yang berada di dalam penguasaan orang lain, yang terhadap barang-barang itu debitur memiliki hak, seperti barang-barang debitur yang disewa oleh pihak lain atau yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak.²⁷

Status barang yang diperoleh debitur setelah putusan pailit dan selama berlangsungnya kepailitan yaitu selama putusan pengadilan niaga yang telah menyatakan debitur pailit tidak diubah sebagai akibat upaya hukum yang berupa kasasi maupun peninjauan kembali, atau selama kurator belum selesai dengan tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta pailit, maka demi hukum masuk ke dalam harta pailit.

Asas ini sejalan dengan asas yang termuat dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Segala harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan untuk segala perikatan debitur.”

4. Para Pihak dalam Kepailitan

a. Debitur

Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU :

“Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”²⁸

²⁷ Adrian Sutedi, **Hukum Kepailitan**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 50

²⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pasal 1 angka (3)

Debitur dapat berupa perseorangan, Bank, bursa efek, perusahaan efek, lembaga penyimpanan & penyelesaian, lembaga kliring & penjaminan, perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi dan dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

b. Kreditor

Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU :

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena suatu perjanjian atau karena Undang-Undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan”²⁹

Jenis-jenis kreditor :

- a) Kreditor Konkuren, yaitu kreditor yang dianggap sama rata dan harus ber bagi dengan kreditor yang lain. Hal ini dikarenakan dalam pelunasan hutangnya, kreditor konkuren tidak mempunyai hak jaminan atau anggunan atas harta debitor.
- b) Kreditor Preferen, yaitu kreditor yang harus didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta pailit.
- c) Kreditor Separatis, yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan. Kreditor ini dapat bertindak sendiri. Kreditor separatis tidak terkena dampak putusan pernyataan pailit debitur, artinya hak-hak eksekusi kreditor separatis dapat

²⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pasal 1 ayat (2)

dijalankan seperti halnya tidak ada kepailitan debitur³⁰.

Berbeda dari kreditor konkuren dan preferen, barang-barang yang dijadikan jaminan dapat dijual sendiri seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

c. Kurator

Kurator merupakan lembaga yang sangat penting keberadaannya, kurator diadakan oleh undang-undang untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang telah ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.

Setelah debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan, maka debitur pailit langsung tidak memiliki kewenangan untuk mengurus dan atau melakukan pengalihan terhadap harta nya, karena sudah mnjadi harta pailit. Kewenangan tersebut berlaih kepada kurator, kurator akan melakukan segala tindakan hukum yang seharusnya dilakukan debitur pailit, berupa pengurusan maupun pengalihan harta pailit, dibawah pengawasan hakim pengawas.

Pada mulanya Kurator adalah Balai Harta Peninggalan saja, namun sekarang kurator ada yang merupakan pihak swasta. Menurut Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU kurator yang bukan BHP harus memenuhi persyaratan:

³⁰ Elijana Tansah, **Kapita Selekta Hukum Kepailitan**, Makalah, disampaikan dalam Pendidikan Singkat Hukum Perusahaan

- “1. Kurator merupakan orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan
2. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai Kurator.”³¹

Tugas dan wewenang utama kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan.

Tugas utama dari kurator dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Tugas administratif

Merupakan tugas mengadministrasikan berbagai proses dalam kepailitan, contohnya : membuat pengumuman; mengundang kreditor dalam rapat kreditor; melakukan pengamanan terhadap harta pailit; melakukan inventarisasi terhadap harta pailit; dan membuat laporan yang diajukan kepada hakim pengawas.

2) Tugas mengurus/mengelola harta pailit

Merupakan tugas pengelolaan atas usaha debitor pailit, kurator dapat bekerja sebagaimana organ direksi dalam perseroan terbatas. Tugas ini dilakukan pada saat proses kepailitan belum sampai pada keadaan insolvensi atau (pailit).

3) Tugas melakukan penjualan dan pemberesan.

Merupakan tugas kurator untuk melakukan pemberesan, maksudnya adalah kurator melakukan penjualan dan

³¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 69 ayat (2)

pembayaran kepada para kreditur. Pada fase-fase terakhir kepailitan, kurator harus mengumumkan bahwa kepailitan telah berakhir. Pengumuman ini dilakukan setelah daftar pembagian memperoleh kekuatan hukum tetap dan diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

B. Kajian Umum tentang Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

Sejak debitor diputus pailit, ia kehilangan kewenangan atas harta pailitnya dan seluruh kewenangan tersebut beralih pada kurator. Kurator berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

1. Pengertian Pengurusan Harta Pailit

Pengurusan harta pailit adalah mengumumkan kepailitan, melakukan tindakan untuk menyegel harta pailit, mencatat dan mendaftarkan harta pailit, melanjutkan usaha debitor dalam pailit, mengalihkkan harta pailit. melakukan tindakan untuk menyimpan harta pailit, melakukan upaya perdamaian dengan maksud untuk menjamin suatu perkara yang sedang berjalan dan juga mencegah timbulnya suatu baru.

Tahap pengurusan harta pailit dilakukan sejak debitor dinyatakan pailit sampai dengan debitor mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian akan diterima oleh kreditor dan selanjutnya dilakukannya

homologasi oleh majelis hakim, yang mengakibatkan kepailita dimana rencana perdamaian diterima oleh kreditor dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan. Tugas kurator harus melakukan tindakan sebagai berikut :³²

- a) Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitur pailit..
- b) Melakukan penelitian aset debitur pailit dan juga tagihan yang dimiliki debitur pailit untuk selanjutnya kurator dapat menentukan langkah selanjutnya untuk menguangkan tagihan tersebut.

Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan harta debitur pailit dan harus mempertahankan nilai dari harta pailit tersebut. Jika terdapat tindakan yang diluar kewenangannya, kurator harus memperoleh persetujuan dari hakim pengawas.

Tugas kurator yang dimaksud dalam Undang-Undang Kepailitan antara lain adalah:

- a. Seorang kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.

³² Marjan Pane, **Permasalahan Seputar Kurator**, Makalah disampaikan dalam lokakarya “Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas : Tinjauan Kritis”, Jakarta 30-31 Juli 2002

- b. Kurator wajib melakukan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atau minimal 2 surat kabar harian yang disetujui oleh hakim pengawas.
- c. Melakukan koordinasi dengan para kreditor seperti:
- d. Melakukan pencatatan.inventarisasi harta pailit; setelah itu kurator harus memulai pembuatan suatu berkas yang memuat dan menyatakan sifat dan jumlah piutang dan utang-utang harta pailit, nama-nama serta domisili kreditor beserta jumlah piutang masing-masing.
- e. Mengamankan harta kekayaan milik debitur pailit.
- f. Menanggihkan hak eksekusi kreditor dan pihak ketiga, membebaskan barang yang menjadi anggunan dengan membayar kepada kreditor. Kurator dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit.
- g. Melakukan tindakan hukum ke pengadilan berdasar izin hakim pengawas dan juga melakukan tuntutan hukum.
- h. Meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit.
- i. Pencocokan utang
- j. Melakukan upaya perdamaian
- k. Melanjutkan usaha debitur pailit serta melakukan pinjaman

2. **Pemberesan Harta Pailit**

Pemberesan harta pailit adalah melakukan penguangan aktiva dengan tujuan membayar atau melunasi utang dengan cara melakukan

likuidasi, yaitu menjual harta pailit tersebut. Hasil likuidasi tersebut didistribusikan kepada masing-masing kreditor sesuai urutannya masing-masing. Sesuai dengan penjelasan pasal 16 ayat (1) UUK :

“Pemberesan baru dapat dilakukan setelah debitur berada dalam keadaan insolvensi, dimana insolvensi baru dapat terjadi bila:

- 1) Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian.
- 2) Apabila ada penawaran perdamaian oleh si pailit maupun oleh kurator, tetapi tidak disetujui oleh para kreditor dalam rapat verifikasi (pencocokan piutang).
- 3) Apabila terdapat perdamaian dan disetujui oleh para kreditor dalam rapat verifikasi tetapi tidak mendapat homologasi (pengesahan) oleh hakim pemutusan kepailitan.”³³

Tindakan selanjutnya terhadap harta debitor pailit yang telah dinyatakan dalam keadaan insolvensi itu adalah melakukan likuidasi, yaitu menjual harta pailit tersebut.

Hasil likuidasi selanjutnya didistribusikan kepada masing-masing kreditor dalam rangka melunasi utang-utang debitor. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan urutan tingkat masing-masing piutang mereka sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Selanjutnya kurator harus membuat daftar pembagian yang isinya adalah jumlah pemasukan dan pengeluaran, upah kurator, daftar dari nama kreditor beserta jumlah tagihan yang telah disahkan dalam rapat kreditor dan juga pembayaran atas tagihan tersebut. Kreditor dapat mengajukan surat keberatan disertai alasan atas daftar pembagian tersebut. Surat keberatan tersebut selanjutnya diajukan kepada panitera pengadilan.

³³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 16 ayat (1)

Kepailitan berakhir setelah kurator selesai melakukan semua pembayaran kepada setiap kreditor sesuai dengan daftar pembagian. Kurator wajib melakukan pengumuman atas berakhirnya kepailitan kepada Berita Negara RI dan Surat Kabar harian (minimal 2 surat kabar harian).

C. Kajian Umum tentang Perbuatan Melawan Hukum

Setiap subyek hukum dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Baik disengaja maupun tidak, sebagaimana yang telah disebutkan pada bab pendahuluan, kurator sebagai subyek hukum juga dapat melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan yang melawan hukum adalah perbuatan yang dikatakan bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum yang tercantum dalam undang-undang. Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sama dengan perbuatan melawan undang-undang (*onwetmatigedaad*).³⁴

Pengertian perbuatan melawan hukum secara perdata adalah:

- 1) Suatu perbuatan atau dengan tidak berbuat sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi orang tanpa perlu adanya suatu hubungan hukum, dimana perbuatan atau dengan tidak berbuat sesuatu tersebut merupakan suatu kecelakaan;

³⁴ Rosa Agustina, 2008, **Perbuatan Melawan Hukum**, FH Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 5

- 2) Tidak dipenuhi nya suatu kewajiban yang dibebankan karena hukum, kewajiban yang ditujukan kepada orang pada umumnya, jika seseorang tidak memenuhi kewajiban yang dibebankan karena hukum tersebut, seseorang dapat diminta ganti rugi;
- 3) Kesalahan perdata yang dapat dituntut, tidak termasuk wanprestasi atas suatu kontrak, terhadap suatu trust, dan lain-lain;
- 4) Suatu perbuatan atau dengan tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum berupa pelanggaran hak orang lain yang timbul karena hukum, dan dapat dituntut ganti rugi oleh pihak yang dirugikan tersebut;
- 5) Kerugian yang tidak di sebabkan karena wanprestasi atas suatu kontrak, berupa perbuatan yang merugiikan hak orang lain yang tidak diciptakan oleh perjanjian atau hubungan kontraktual , melainkan karena hukum.³⁵

Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdata diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata di bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yaitu :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”³⁶

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

³⁵ Rosa Agustina, *Op.Cit*, hlm. 6

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain atau perbuatan (atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum. Ada 4 unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH):

1) Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan disini adalah perbuatan melawan hukum secara keperdataan yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan melawan hukum dapat berupa aktif yaitu berbuat sesuatu dan dalam arti pasif yaitu tidak berbuat sesuatu disaat pelaku mempunyai suatu kewajiban hukum untuk berbuat. Dalam perbuatan melawan hukum harusnya tidak diperlukan ada unsur persetujuan ataupun kata sepakat dan juga tidak ada unsur kausa yang diperbolehkan seperti yang terdapat dalam suatu perjanjian atau kontrak.

Suatu perbuatan dapat dikatakan PMH, tidak hanya hal yang bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu, asalkan memenuhi salah satu unsur berikut:

- a. Bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;

d. Bertentangan dengan keharusan yaitu perbuatan mengenai orang lain atau benda yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat

2) Adanya unsur kesalahan

Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggung jawabkan kepada si pelaku.

3) Adanya kerugian

Perbuatan melawan hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4) Adanya hubungan sebab akibat

Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud disini adalah mengenai asas-asas,

norma hukum serta kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁷

Penelitian dengan jenis normatif ini akan mengkaji mendalam mengenai batasan dan kriteria perbuatan kurator dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dengan menelaah dan mengkaji suatu Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tema pokok penelitian. Dalam pendekatan ini, Peraturan Perundang-undangan merupakan dasar awal melakukan analisis, sehingga dengan pendekatan perundang-undangan akan diperoleh sebuah analisis yang jelas terkait permasalahan yang diteliti.³⁸

2. Pendekatan Kasus (*Case-Approach*)

Pendekatan Kasus dalam penelitian Normatif bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui penerapan norma-norma atau kaidah hukum

³⁷Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1**, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 2004, hal 52.

³⁸ Mukti Fajar dan Yulianti Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 185

yang dilakukan dalam praktik hukum, dengan menelaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.³⁹

Kasus-kasus yang dikaji merupakan kasus yang memiliki hukum tetap khususnya dalam penelitian ini adalah mengkaji mendalam mengenai batasan dan kriteria perbuatan kurator dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdara merujuk pada beberapa putusan pengadilan, yaitu 658K/Pdt.Sus-Pailit/2014 dan 78K/Pdt.sus-Pailit/2015.

C. Jenis bahan hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berikut adalah penjelasan mengenai bahan hukum dalam penelitian ini:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat dan otoritatif. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan yaitu

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

³⁹ Johny Ibrahim, **Teori Dan Metode Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 268

- b) Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan;
- c) Putusan Nomor 658 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 dan 78-PK/Pdt.sus-Pailit/2015.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer:

- 1) Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Penjelasan Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan;
- 3) Buku-buku ilmiah yang terkait. Yaitu buku tentang Kepailitan dan PKPU;
- 4) Doktrin, pendapat dari ahli hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.
- 5) Jurnal Hukum

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- 3) Internet.

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagai bahan penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan di perpustakaan maupun melalui media internet.

D. Teknik pengumpulan bahan hukum

Penelusuran bahan hukum primer, sekunder atau tersier dapat dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan akan diambil kaidah hukumnya masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk literatur akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait dan akhirnya semua bahan tersebut diatas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

E. Teknik analisis bahan hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.⁴⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum yang ada dianalisis dengan teknik analisa menggunakan:

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hal 251-252

1. Penafsiran sistematis adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.
2. Penafsiran tata bahasa (gramatikal) adalah berdasar ketentuan yang terdapat di peraturan perundang-undangan ditafsirkan dengan berpedoman pada arti perkatan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan
3. Penafsiran analogi dilakukan dengan memberi kiasan pada kata-kata dalam peraturan yang sesuai dengan asas hukum nya, sehingga suatu peraturan yang sesungguhnya tidak ada dianggap termasuk dan sesuai dengan bunyi peraturan tersebut⁴¹.

F. Definisi konseptual

1. Pailit

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada kreditornya sehingga dapat dimohonkan putusan kepailitan oleh Hakim yang menyebabkan sita umum dan debitor kehilangan haknya untuk mengurus hartanya.

2. Pengurusan Harta Pailit

Tindakan kurator berupa mengumumkan kepailitan, melakukan penyegelan harta pailit, mencatat dan mendaftarkan harta pailit, melanjutkan usaha debitor pailit, membuka jika ada surat-surat telegram

⁴¹ CST. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum**, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.. 36.

debitur pailit, melakukan peralihan. menyimpan harta pailit, melakukan perdamaian dengan tujuan untuk menjamin suatu perkara yang berjalan atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara baru.

3. Pemberesan Harta Pailit

Tindakan kurator berupa menuangkan aktiva untuk membayar atau melunasi utang dengan cara melakukan likuidasi, yaitu menjual harta pailit tersebut. Hasil likuidasi tersebut didistribusikan kepada masing-masing kreditor sesuai urutannya masing-masing.

4. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau perbuatan (atau pun dengan tidak berbuat) yang dikatakan bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.

BAB IV

PEMBAHASAN

Tugas dan wewenang kurator adalah melaksanakan tugas utama yaitu melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak putusan pailit diucapkan. Kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki kurator dapat malah merugikan pihak yang diputus pailit maupun para kreditor selama menjalankan tugasnya berupa mengurus dan membereskan harta pailit. Apabila kurator melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi kreditor maupun debitornya, tercantum dalam Pasal 72 UUK yang berbunyi:

“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”⁴²

Terdapat kasus yang menunjukkan bahwa besarnya kewenangan yang diberikan oleh UU Kepailitan kepada Kurator dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit, dapat menyebabkan kemungkinan penyalahgunaan wewenang demi menguntungkan pihak Kurator sendiri ataupun salah satu dari pihak Kreditor yang bersangkutan serta dapat pula menimbulkan perbuatan melawan hukum.⁴³

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab pendahuluan, menurut sifat kurator, ia dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga ia juga bertanggung jawab atas kerugian yang di alami oleh pihak ketiga.⁴⁴ Maka dari itu kurator juga dapat bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian yang

⁴² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 69

⁴³ Abdul R. Saliman. **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan**, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2005, hlm. 122

⁴⁴ Imran Nating, **Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2004, hlm. 115

diderita oleh pihak ketiga. Perbuatan ini dapat dibebankan pada harta pribadi kurator dan tidak dapat dibebankan pada harta pailit jika tindakan yang dilakukan kurator merupakan tindakan yang ada diluar kewenangan yang telah di cantumkan dalam undang-undang.⁴⁵

Kedua putusan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator bertentangan satu sama lain, ini dikarenakan dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tidak mengatur mengenai mengenai sejauh mana kurator harus bertanggung jawab dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Tidak ada satupun pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator.

A. Posisi Kasus Putusan Nomor 658K/Pdt.Sus-Pailit/2014 dan 78-PK/Pdt.sus-Pailit/2015

Kasus ini bermula dari PT Panca Wiratama Sakti yang diputus pailit berdasar dengan adanya Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan kembali Nomor 135PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 14 Maret 2013.

Sejak saat itu segala pengurusan dan pemberesan harta milik debitor pailit beralih kepada Tim Kurator PT PWS (PT Panca Wiratama Sakti yang sedang dalam keadaan pailit) yang penunjuukkan kuratornya berdasar pada Putusan Mahkamah Agung No 135PK/Pdt.Sus/2012, diputus pada tanggal 14 Maret 2013 dan Putusan No 11/Pailit/2011/PN.Niaga Jkt.Pst.,diputus pada tanggal 12 Juni 2014, yang dalam kasus ini menjadi Tergugat. Debitor pailit

⁴⁵ Imran Nating, *Op.Cit*, hlm. 115

ini memiliki beberapa kreditor, salah satunya adalah PT Takara Golf Resort. PT Takara Golf Resort adalah penyewa tanah milik PT Panca Wiratama Sakti yaitu sebidang tanah dengan luas 709.600 M² (sejumlah tujuh ratus sembilan ribu enam ratus meter persegi.) Tanah tersebut atau objek Sewa pada mulanya adalah milik PT PWS. Berdasarkan perjanjian sewa, penggugat berhak mengelola tanah sampai tanggal 6 April 2018 atau hingga sepanjang masa berlakunya Hak Guna Bangunan atas Objek Sewa dengan harga sewa Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

Penggugat (PT Takara Golf) dan PT PWS telah sepakat untuk memberikan kesempatan kepada PT Takara Golf untuk memperpanjang masa sewa setelah berakhirnya SHGB dengan memberi tahu 2 tahun lebih dahulu sebelum masa sewa berakhir.

Perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik, penggugat memenuhi kewajiban dengan membangun dan menyelesaikan proyek Takar Golf Ressort beserta sarana dan fasilitasnya, penggugat juga telah membayar pajak yaitu pajak bumi dan bangunan selama waktu Perjanjian Sewa. Maka dari itu, penggugat mempunyai hak untuk mengelola lahan Takara Golf Resort selama perjanjian sewa berlangsung. Segala fasilitas lapangan golf atau benda-benda dan bangunan apapun yang ada di atas tanah tersebut adalah milik Penggugat sampai berakhirnya masa sewa

Sedangkan kewajiban Debitor Pailit adalah memperpanjang masa berlakunya SHGB Lahan Golf tersebut dan juga menanggung serta membayar biaya biaya yang ada.

Namun, pada tanggal 14 Maret 2013 berdasar putusan Mahkamah Agung RI pada peninjauan kembali Nomor 135PK/ Pdt.Sus/2012, PT PWS dijatuhi putusan pailit. Dan akibat dari pailit tersebut, segala pengurusan dan pemberesan atas harta pailit akan beralih dari Debitur pailit yaitu PWS kepada Tim Kurator yang ditunjuk, yang tertera pada bukti P-3.

Pada tanggal 3 Juli 2014 Tim Kurator mengajukan surat untuk mengakhiri perjanjian sewa menyewa dengan PT Takara Golf dengan dasar Pasal 36 ayat(3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, memberi kewenangan pada kurator untuk melakukan pengakhiran perjanjian yaitu perjanjian timbal balik antara debitor pailit dengan pihak ketiga. Pihak lain tersebut dapat menuntut ganti rugi serta dianggap dan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.

Tim Kurator tersebut dalam suratnya memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan penghentian aktivitas pengelolaan Takara Golf Ressort dan menyerahkan pengelolaan beserta semua sarana dan fasilitas Ressort tersebut. Tim Kurator juga menyatakan bahwa penggugat bisa mengajukan ganti rugi atas berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa kepada Tergugat.

Pada tanggal 15 Juli 2014 Tim Kurator kembali mengirim surat yang isinya “Pemberitahuan Ulang tentang Surat Peringatan/Somasi I” (“Pemberitahuan Ulang”) yang isinya adalah Tergugat meminta Penggugat untuk dapat melakukan tindakan berupa penyerahan lahan golf kepada

tergugat yang dilakukan sebelum pengakhiran perjanjian sewa tanggal 3 Agustus 2014.

Penggugat (PT Takara Golf Ressor) mengajukan gugatan atas tindakan kurator dalam tindakan mengakhiri perjanjian sewa menyewa yang dilakukan nya secara sepihak yang dianggap telah memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum. Terhadap gugatan diatas, Pengadilan Niaga pada PN Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 08/Pdt-Sus-Gugatan-Lain-lain/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 11/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 September 2014 dengan amar putusan menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Selanjutnya penggugat mengajukan kasasi kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri/Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung RI mengeluarkan amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 658K/Pdt.Sus-Pailit/2014 pada tanggal 23 Desember 2014 yang pada amarnya mengabulkan permohonan kasasi penggugat, mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menyatakan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat yaitu Kurator telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Sesudah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, Termohon Kasasi/Tergugat meminta permohonan PK atau pemeriksaan peninjauan kembali yang disertai dengan alasan alasannya yang diberikan kepada panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juni 2015.

Pada amar nya Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 78PK/Pdt.sus-Pailit/2015 menolak seluruh gugatan Penggugat.

B. Isi Gugatan

Menurut penggugat, tindakan tergugat melakukan pengakhiran perjanjian sewa secara sepihak adalah bertentangan dengan hukum dengan alasan:

- a. Perjanjian Sewa Menyewa dibuat sesuai Pasal 1320 BW, dan sah serta memenuhi persyaratan, yaitu : kesepakatan yang secara tertulis, dibuat oleh para pihak yang mempunyai berhak dan berwenang mewakili, perikatan tersebut dibuat untuk suatu hal spesifik yaitu persewaan lahan Lapangan Golf Takara dan perikatan tersebut tidak melanggar hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Maka dari itu, berdasarkan asas *pacta sun servanda* Perjanjian Sewa Menyewa tersebut sah dan telah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak Penggugat dan Debitor pailit

- b. Menurut pasal 1576 BW, jika barang yang menjadi obyek sewa dijual maka bukan berarti bahwa perjanjian sewa menyewa terputus kecuali

diperjanjikan lain pada saat dibuatnya perjanjian sewa. Maka dari itu jika kepemilikan lahan lapangan golf tersebut beralih misalkan karena lelang ataupun jual beli yang dilakukan kurator, hal ini tidak berarti pengikatan sewa-menyewa berhenti atau batal;

Hak penyewa dalam hal ini PT Takara Golf dilindungi oleh hukum dan pihak penyewa berhak untuk melakukan penguasaan dan pemanfaatan tanah sampai jangka waktu yang diperjanjikan;

- c. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1266 BW, syarat batal otomatis berlaku dalam perjanjian timbal balik, apabila satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal ini persetujuan tidak serta merta batal demi hukum tetapi pembatalan harus diminta ke pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun terdapat klausa yang menyatakan bahwa tidak dipenuhinya kewajiban menjadi syarat batalnya suatu persetujuan
- d. Dalam perjanjian sewa menyewa jika kedua belah pihak telah selesai melakukan prestasinya, maka jika ingin membatalkan perjanjian tersebut haruslah sesuai dengan pasal 1266 KUHPerdara, yaitu harus dilakukan melalui hakim atau pengadilan.;
- e. Adanya perbuatan tergugat yang termasuk iktikad tidak baik yaitu dengan melakukan pengakhiran perjanjian sewa hanya dengan melalui somasi, hal ini tidak sesuai dengan prinsip kepatutan sebagaimana yang dimaksud dalam 1399 KUHPerdara.

f. Kurator telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga dan/atau memelihara nilai harta debitor pailit. Perbuatannya berupa menghentikan perjanjian Sewa Menyewa secara sepihak malah dapat menurunkan nilai harta debitor pailit, hal ini bertolak belakang dengan apa yang telah diupayakan Penggugat berupa merawat dan mengelola lahan Golf sehingga menaikkan nilai jual

g. Perbuatan Tergugat berupa pengakhiran Perjanjian Sewa Menyewa secara sepihak hanya dengan Somasi I dan surat Pemberitahuan Ulang termasuk Perbuatan Melawan Hukum menurut pasal 1365 BW

Perbuatan mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa secara sepihak yang dilakukan oleh kurator atau Tergugat dalam Somasi I telah memenuhi syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:

- a. Tidak sesuai dengan Pasal 1266 KUHPerdara dan juga tanggung jawab dan kewajiban hukum Tergugat sebagai Kurator;
- b. Timbulnya kerugian yang diderita Penggugat, dengan adanya kewajiban menyerahkan lahan lapangan golf sebelum masa waktu perjanjian sewa menyewa berakhir. Timbul kerugian materiil dengan total Rp97.317.500.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan imateriil berupa pencemaran nama baik penggugat di antara member lapangan golf yang tidak dapat dinilai dengan uang karena telah dibangun sejak dahulu, namun jika dinilai dengan uang maka dapat dinilai dengan uang sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- c. Adanya hubungan sebab akibat, yaitu kerugian tersebut ditimbulkan karena berakhirnya perjanjian sewa menyewa oleh tergugat;
- d. Tergugat selaku kurator harusnya mempertimbangkan segala akibat dan kerugian yang akan timbul dari perbuatannya tersebut. Sehingga Perbuatan tergugat dengan melakukan pengakhiran perjanjian sewa menyewa tersebut termasuk kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian tersebut;
- e. Kesalahan yang dilakukan oleh tergugat mengakibatkan kerugian yang besar bagi penggugat; Maka dari itu, unsur-unsur diatas dapat menjadi dasar bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Oleh karena putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2014/PN Niaga Jkt. Pst jo Nomor 11/Pailit/2011/PN/Niaga Jkt.Pst menolak gugatan Penggugat seluruhnya maka Penggugat mengajukan permohonan kasasi. Keberatan Kasasi yang diajukan oleh pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah :

1. *Judex Facti* telah keliru dalam menilai Pokok Gugatan Pemohon Kasasi / Dahulu Penggugat.

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan pokok gugatan Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat. Dimana pokok gugatan adalah mengenai perbuatan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dalam mengakhiri Perjanjian Sewa Menyewa dengan Hak Pengelolaan Nomor 100 tertanggal 20 Oktober 1993 secara sepihak yang dilakukan dengan cara **hanya** menyatakan melalui surat

perihal “Pengakhiran Perjanjian Sewa Tanah/ Somasi I” yang di kuatkan kembali dengan surat “Pemberitahuan Ulang tentang Surat Peringatan/Somasi I”

Perbuatan tersebut merupakan perbuatan main hakim sendiri dan bertentangan dengan pasal 1266 KUHPerdara, dimana pembatalan suatu perjanjian harus dimintakan kepada Pengadilan, mengingat Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat menolak atau tidak menyetujui pengakhiran perjanjian Sewa Menyewa oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat karena masih terdapat perselisihan diantara mereka. Pengakhiran perjanjian sewa menyewa harus dimintakan ke pengadilan berdasarkan prinsip kesetaraan (*equality*) dan keadilan (*fairness*).

Pemohon Kasasi mengemukakan bahwa tidak ada kesesuaian antara pertimbangan hukum dan putusan dari *Judex Facti* dengan pokok gugatan. Dalam pertimbangan hukum dan putusan nya hanya menilai mengenai kewenangan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dalam memutus suatu perjanjian timbal balik berdasar pada Pasal 36 ayat (3) UUK serta hanya mengenai tuntutan ganti rugi atas tindakan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat, sedangkan yang menjadi pokok perkara, Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat tidak mempermasalahkan mengenai kewenangan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat, melainkan perbuatan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat dalam melakukan pengakhiran perjanjian sewa menyewa yang dilakukan hanya melalui surat. Hal tersebut telah melanggar asas kepatutan dan mengesampingkan rasa

keadilan serta asas iktikad baik yang dikandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

2. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Perbuatan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat Yang Telah Memenuhi Syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata

Perbuatan Termohon Kasasi / dahulu Tergugat dalam memutus perjanjian sewa menyewa secara sepihak yang hanya dilakukan melalui surat telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1266 KUHPerdata dan telah memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai pasal 1365 KUHPerdata. Hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dan hanya membahas mengenai kewenangan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat.

Pengakhiran Sewa Menyewa secara sepihak yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena :

- a. Bertentangan dengan ketentuan pasal 1266 KUHPerdata, perbuatan Termohon Kasasi/dahulu tergugat telah melanggar kewajiban hukum untuk memenuhi asas *pacta sun servanda* sebagaimana tercantum pada pasal 1338 KUHPerdata. Bertentangan dengan Pasal 38 ayat (3) Undang-undang Kepailitan dan PKPU.

“Dalam hal uang sewa telah dibayar dimuka, maka perjanjian sewa-menyewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut”

Sesuai pasal 2 dan 3 Perjanjian Sewa, pemohon Kasasi/dahulu Penggugat telah membayar uang sewa sebesar 1,5M untuk jangka waktu sampai 6 April 2018. Dengan itu maka Termohon Kasasi/dahulu Tergugat tidak dapat mengakhiri perjanjian sewa menyewa sebelum berakhirnya masa sewa tersebut. Sesuai pasal 1576 jika obyek tersebut harus dilelang, tidak berarti hak sewa menyewa berakhir.

- b. Adanya kerugian materiil yang diderita pemohon Kasasi/dahulu Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat yang keseluruhannya mencapai Rp. 97.317.500.000 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Dan juga kerugian Immateriil atas tercemarnya nama baik Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat
- c. Kerugian yang timbul tersebut disebabkan oleh tindakan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat. Kerugian ini diderita sejak 3 Juli 2014 yang mengganggu kegiatan operasional Takara Golf Ressort
- d. Perbuatan Termohon Kasasi/dahulu Tergugat sebagai kurator seharusnya mengetahui segala akibat dan kerugian yang timbul dari dihentikannya Perjanjian Sewa Menyewa melalui Surat. Dan kesalahan itu mengakibatkan timbulnya kerugian.

Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat menegaskan bahwa sebagai kurator, Termohon Kasasi/dahulu Tergugat harus tetap mengindahkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum perdata.

C. Dasar Pertimbangan Hakim dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 658K/Pdt.Sus-Pailit/2014

C.1 Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan Majelis Hakim terhadap persoalan tersebut telah mempertimbangan memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* nya dalam hal ini, Pengadilan Niaga pada Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangannya sebagai berikut :

1. Menimbang dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa dengan dasar Hak Pengelolaan Nomor 100 tanggal 20 Oktober 1993 dibuat di hadapan Notaris Miryam Magdalena, S.H. Notaris di Jakarta antara PT Panca Wiratama Sakti, (Dalam Pailit) atau PT PWS dengan Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Sewa atau bukti P-1. Dimana sesuai dengan perjanjian tersebut Pemohon Kasasi mempunyai menggunakan tanah seluas 70 Hektar milik debitor Pailit untuk membangun lapangan golf termasuk sarana pendukungnya. Pemohon Kasasi hanya menyewa tanah milik Debitor Pailit sedangkan seluruh fasilitas baik lapangan golf dan sarana pendukung dibangun oleh Pemohon Kasasi.

“Hal ini didasari oleh 5 (lima) sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yaitu :

- a. SHGB Nomor 01/Tapos tanggal 7 April 1988 seluas $\pm 435.800 \text{ M}^2$ (empat ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus meter persegi);
- b. SHGB Nomor 02/Tapos tanggal 7 April 1988 seluas $\pm 273.800 \text{ M}^2$ (dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus meter persegi);

- c. SHGB Nomor 17/Tapos tanggal 8 Agustus 1994 seluas $\pm 5.740 \text{ M}^2$ (lima ribu tujuh ratus empat puluh meter persergi);
- d. SHGB Nomor 19/Tapos tanggal 8 Agustus 1994 seluas $\pm 13.980 \text{ M}^2$ (tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persergi);
- e. SHGB Nomor 21/Tapos tanggal 8 Agustus 1994 seluas $\pm 5.957 \text{ M}^2$ (lima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi);⁴⁶

2. Pemohon Kasasi memiliki hak untuk menggunakan tanah debitor Pailit untuk melakukan pembangunan lapangan golf termasuk sarana pendukungnya. Pemohon Kasasi hanya menyewa tanah milik Debitor Pailit sedangkan seluruh fasilitas baik lapangan golf dan sarana pendukung dibangun oleh Pemohon Kasasi.

3. Dengan meneliti pasal 36 ayat(1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Telah ditemukan fakta bahwa perjanjian sewa belum terpenuhi seluruhnya karena masih kurang sebagian lagi karena masa sewa baru akan berakhir pada tanggal 6 April 2018. Sebagaimana tercantum pada pasal 2 Perjanjian Sewa tersebut. Selanjutnya sesuai pasal 3 Perjanjian Sewa. Berdasarkan Perjanjian sewa pasal 3, menyebutkan bahwa :

“Perjanjian Sewa disepakati bahwa harga sewa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk sisa jangka waktu berlakunya SHGB Lahan Lapangan Golf. Selanjutnya, apabila masa berlakunya SHGB Lahan Lapangan Golf telah berakhir, para pihak dalam Perjanjian Sewa sepakat untuk memberikan hak opsi kepada Penggugat untuk memperpanjang masa sewa dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu yaitu 2 (dua) tahun sebelum masa Perjanjian Sewa berakhir.”⁴⁷

⁴⁶ Putusan Mahkamah Agung Nomor 78 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 hlm. 2

⁴⁷ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No 78 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 hlm. 2

Pemohon kasasi telah membayar lunas harga sewa Rp. 1.500.000.000,00 sehingga seluruh fasilitas lapangan golf adalah milik Pemohon Kasasi dan tidak termasuk dalam harta pailit.

Dan oleh karena itu, penggunaan kekuasaan Tergugat yang memutus hubungan sewa secara sepihak, tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan ayat (1) Pasal 36 karena belum terjadi kesepakatan antara kurator dengan penyewa mengenai tenggat waktu untuk menentukan apakah perjanjian akan dilanjutkan atau tidak.

Selanjutnya hakim berpendapat bahwa pasal 36 ayat (1) UUK hanyalah dapat diterapkan pada suatu perjanjian timbal balik yang belum dipenuhi seluruhnya atau baru akan dipenuhi oleh para pihak. Itu merupakan syarat untuk dapat menerapkan pasal tersebut. Pengakhiran perjanjian yang dilakukan kurator sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU harus ditafsirkan bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga *incasu* Pemohon Kasasi, yaitu berupa jaminan dari kurator atas kesanggupan untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut

Dengan telah dibayarkan lunas harga sewa sampai tahun 2018 maka perjanjian sewa menyewa antara debitor pailit dan pemohon kasasi telah selesai dilaksanakan dan tidak dapat diterapkannya ketentuan Pasal 36 ayat (3) UUK.

Menurut majelis hakim, tindakan kurator tersebut memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum namun mengenai kerugian

yang diminta penggugat tidak dapat dikabulkan karena sebenarnya pelaksanaan pemutusan hubungan sewa tersebut belum terlihat. Termohon kasasi/kurator tidak mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian sewa menyewa tersebut dan merupakan tindakan diluar kewenangannya.

C.2 Amar Putusan

Mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Nomor 08/Pdt.Sus-Gugatan.Lain-lain/2014/PN Niaga Jkt.Pst. jo. Nomor11/Pailit/2011/PN Niaga Jkt. Pst. Pada tanggal 22 September 2014

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat atau kurator melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pengakhiran perjanjian secara sepihak antara PT Panca Wiratama Sakti dengan Penggugat;
3. Menyatakan Akta Perjanjian Sewa Menyewa antara PT Panca Wiratama Sakti dengan Penggugat sah dan mengikat secara hukum dan dapat diperpanjang kembali oleh Penggugat.

D. Dasar Pertimbangan Hakim dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 78-PK/Pdt.sus-Pailit/2015

D.1. Dasar Pertimbangan Hakim

Menimbang berdasarkan alasan peninjauan kembali tersebut majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut telah dibenarkan menilai dari alasan peninjauan kembali pada 15 Juni 2015 dan jawaban dari alasan peninjauan kembali tanggal 24 Juni 2015 menurut majelis hakim, Judex Juris telah melakukan kekeliruan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Berdasarkan pada penjelasan atas Pasal 3 ayat(1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pokok gugatan Penggugat adalah merupakan “Pengakhiran perjanjian sewa-menyewa” harta dari Debitur Pailit, termasuk dalam gugatan “hal-hal lain”. Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1 angka1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”⁴⁸

Peraturan tersebut bersifat “lex spesialis” , maka dari itu dilihat dari Pasal 36 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dinyatakan antara lain bahwa:

“Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Kurator tidak memberikan atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai Kreditor Konkuren”⁴⁹

⁴⁸ Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 1 angka 1

⁴⁹ Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 36 ayat (3)

Dalam proses kepailitan, kurator diberikan kesempatan dan keistimewaan untuk mendaftarkan tagihannya, dia tidak diikat dengan masa waktu pendaftaran pada umumnya.

Perbuatan kurator yaitu tergugat untuk melakukan pengakhiran perjanjian sewa menyewa yang masih berlaku antara Penggugat selaku penyewa dengan tergugat yaitu PT Panca Wiratama Sakti dalam pailit yang merupakan pailit dapat dibenarkan dan tidak termasuk perbuatan melawan hukum.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Tim Kurator PT PANCA WIRATAMA SAKTI, Tbk., (Dalam Pailit), tersebut dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/Pdt.Sus- Pailit/2014 tanggal 23 Desember 2014.”⁵⁰

D.2. Amar Putusan

Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kurator PT PWS

1. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 658K/Pdt.Sus- Pailit/2014 tanggal 23 Desember 2014;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon PK/Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

⁵⁰ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No 78 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 hlm. 43

E. Analisa Pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi Nomor 658K/Pdt.Sus-Pailit/2014 dan tingkat peninjauan kembali 78-PK/Pdt.sus-Pailit/2015

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan tingkat kasasi Nomor 658K/Pdt.Sus-Pailit/2014 menimbang bahwa dalam Perjanjian Sewa Menyewa dengan Hak Pengelolaan No 100 tanggal 20 Oktober 1993 dibuat di hadapan Notaris Miryam Magdalena Indarni Wardi, S.H. Notaris di Jakarta antara PT Panca Wiratama Sakti, Tbk (Dalam Pailit) atau PT PWS dengan Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Sewa atau bukti P-1.

Berdasarkan perjanjian, pemohon kasasi mempunyai hak untuk membangun dan mengelola usahanya yaitu lapangan golf, diatas tanah dari debitor pailit yaitu PT PWS. Dalam kasus ini, Pemohon Kasasi atau PT Takara Golf hanya menyewa tanah milik Debitor Pailit saja, maka seluruh fasilitas dan bangunan nya dibangun oleh PT Takara Golf .

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa SHGB adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan. Hak Guna Bangunan yang dimaksud disini adalah kewenangan yang diberikan atau suatu hak yang didapatkan untuk menggunakan suatu lahan yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu 30 tahun yang atas permintaan pemegang haknya, mengikat keperluan dan keadaan bangunan-bangunannya dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu maks.20 tahun. Pemegang sertifikat ini hanya dapat mempergunakan

lahan, dapat berupa membangun sesuatu diatasnya ataupun untuk keperluan lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Pemberian Hak Guna Bangunan di atas Hak Milik ada yang melandasi perjanjian awalnya dengan sewa menyewa. Akta ini memuat pasal yang pada intinya menjelaskan bahwa penyewa boleh memohonkan Hak Guna Bangunan seluas yang disewakan dan dengan masa yang tidak melebihi batas habis sewa menyewanya. Konsekuensi dari pasal tersebut adalah pemegang Hak Milik bersedia meminjamkan sertifikat asli dari tanah yang disewakan tersebut untuk permohonan Hak Guna Bangunan di atas Hak Milik.⁵¹

Perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian timbal balik, yang artinya baik kreditur maupun debitur memiliki prestasi yang harus ditunaikan. Dalam hal perjanjian sewa menyewa, debitur mempunyai prestasi untuk menyerahkan kepemilikan sementara atas tanahnya dan menjaga agar tidak ada gangguan kepada kreditur dalam masa sewa tanah tersebut sedangkan prestasi dari kreditur adalah membayar masa sewa dan menjaga tanah dari kerusakan selama masa sewanya.

Selanjutnya Hakim Pengadilan Niaga Dengan meneliti pasal 36 ayat(1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004. Telah ditemukan fakta bahwa perjanjian sewa belum terpenuhi seluruhnya karena masih kurang sebagian lagi karena masa sewa baru akan berakhir pada 6 April 2018. Sebagaimana tercantum pada pasal 2 Perjanjian Sewa tersebut. Selanjutnya sesuai pasal 3 Perjanjian Sewa. Berdasarkan Perjanjian sewa pasal 3, menyebutkan bahwa :

⁵¹ Salim, H.S, **Pokok-Pokok hukum Perikatan dan Hukum Jaminan**,. Jakarta, Liberty. 2005, *hlm.* 59

“Perjanjian Sewa disepakati bahwa harga sewa sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk sisa jangka waktu berlakunya SHGB Lahan Lapangan Golf. Selanjutnya, apabila masa berlakunya SHGB Lahan Lapangan Golf telah berakhir, para pihak dalam Perjanjian Sewa sepakat untuk memberikan hak opsi kepada Penggugat untuk memperpanjang masa sewa dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu yaitu 2 (dua) tahun sebelum masa Perjanjian Sewa berakhir.”

Penggunaan kekuasaan Tergugat yang memutus hubungan sewa secara sepihak, tidak dapat dibenarkan dan termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Meskipun terdapat perjanjian sewa menyewa antara debitor pailit dengan PT Takara Golf, namun tindakan kurator termasuk perbuatan melawan hukum. Wanprestasi ini sendiri merupakan suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitor⁵². Bentuk dari wanprestasi ini dapat berupa Tidak memenuhi prestasi sama sekali, Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. , Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Jika seorang debitor (berutang) disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmach*) tidak dapat memenuhi kewajiban atas prestasi. Dengan demikian, di dalam dunia perniagaan, apabila debitor tidak mampu ataupun tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur, maka telah dipersiapkan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu kepailitan.

Perbedaan mendasar antara anprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah :

⁵² R. Subekti, 1979, Hukum Perjanjian, Cetakan Keempat, Pembimbing Masa, Jakarta, hlm.59

1. Wanprestasi timbul dari persetujuan/ perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum timbul akibat dari adanya perbuatan orang
2. Unsur dari wanprestasi adalah : Ada perjanjian oleh para pihak; Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati; Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian. Sedangkan unsur dari perbuatan melawan hukum adalah : adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melanggar hukum, unsur kesalahan, unsur kerugian dan adanya hubungan sebab akibat

Kurator telah melakukan perbuatan yang salah dikarenakan ia telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan pasal 36 Undang-undang Kepailitan. Sehingga sumber kesalahan dari gugatan yang diajukan kepada kurator bukanlah karena ia telah melanggar hubungan kontraktual dengan kreditor, melainkan karena ia telah melanggar kewajiban yang telah tercantum pada Undang-Undang Kepailitan maka tindakan nya bukan termasuk wanprestasi namun termasuk sebagai perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya hakim berpendapat bahwa pasal 36 ayat(1) Undang-undang Kepailitan dan PKPU sebenarnya hanya lah dapat diterapkan terhadap suatu perjanjian timbal balik yang belum dipenuhi seluruhnya atau baru akan dipenuhi oleh salah satu pihak, itu merupakan syarat untuk dapat diterapkannya pasal tersebut. Pengakhiran perjanjian yang dilakukan kurator

sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 36 ayat(1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU harus ditafsirkan bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga *incasu* Pemohon Kasasi, yaitu berupa jaminann dari kurator atas kesanggupan untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut

Dengan telah dibayarkan lunas harga sewa sampai tahun 2018 maka perjanjian sewa menyewa antara debitor pailit dan pemohon kasasi telah selesai dilaksanakan dan tidak dapat diterapkannya ketentuan Pasal 36 ayat (3) UUK.

Dalam KUHPerdara mengatur bahwa dalam perjanjian timbal balik terdapat asas “Apabila salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik tidak berprestasi, pihak lainpun tidak perlu memenuhi prestasinya” sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1266 KUHPerdara yang berbunyi

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan timbal balik. Manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.”

Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa kreditur lah yang berhak menuntut pembatalan dan bukannya debitur yang telah lalai. Terdapat 3 syarat dalam pembatalan perjanjian timbal balik :

1) Merupakan perjanjian timbal balik

Perjanjian tersebut harus termasuk perjanjian timbal balik yang baik debitur maupun krediturnya memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi. Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan PT PWS dengan PT Takara Golf merupakan perjanjian timbal balik.

2) Harus adanya ingkar janji

Salah satu pihak dalam perikatan apabila tidak melaksanakan prestasinya maka dikatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau sama sekali tidak melaksanakan perjanjian⁵³

3) Putusan Hakim

Batalnya persetujuan timbal balik harus melalui putusan hakim, karena pasal 1266 KUHPdata merupakan aturan yang bersifat mengatur, maka dalam membatalkan persetujuan timbal balik ini memerlukan persetujuan hakim .

Akibat dari pembatalan ini, masing-masing pihak tidak lagi perlu memenuhi prestasinya, maka pihak lainnya dapat menuntut pengembalian. Kreditur yang mengajukan pembatalan persetujuan berhak untuk menuntut ganti rugi sebagai akibat dari ingkar janji dan pembatalan.

Namun dengan diputusnya pailit seorang Debitor yang dalam kasus ini adalah PT PWS maka segala pengurusan dan pemberesan harta pailit beralih kepada Kurator dan Undang-undang yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU atau UUK. Sehingga berlaku lah asas *lex speciali derogat legi generalis*.

Dalam kasus diatas, pertimbangan Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara No. 78PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 sangat berbeda jika dibandingkan dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Kasasi Perkara No.

⁵³ M. Yahya Harahap, **Segi-segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 60

658K/Pdt.Sus-Pailit/2014. Perbedaan pendapat ini adalah mengenai perbedaan penafsiran Pasal 36 UU Kepailitan yang berbunyi:

- “1. Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.
2. Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.
4. Apabila Kurator menyatakan kesanggupannya maka Kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut.”⁵⁴

Putusan Majelis Hakim kasasi tersebut didasari oleh perlindungan hukum pihak ketiga. Berdasarkan pertimbangannya, perjanjian sewa menyewa antara PT Takara Golf dan PT PWS telah selesai dilaksanakan karena penyewa yaitu PT Takara Golf telah memberikah uang sewa kepada pemilik tanah (debitor pailit) yaitu PT PWS dan ia telah memberikan tanah yang dijadikan obyek sewa tersebut.

Berdasarkan pasal 36 ayat(1) UU Kepailitan dan PKPU, penafsiran hakim atas kalimat “belum atau sebagian terpenuhi” bukanlah dimaknai sebagai belum selesainya masa sewa atau belum berakhir jangka waktunya, melainkan pada saat pelaksanaan kontrak tersebut, apakah telah selesai atau tidak prestasi diantara kedua belah pihak. Maka dapat disimpulkan bahwa kurator **tidak berhak** mengakhiri perjanjian sewa menyewa atau perjanjian

⁵⁴ Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU pasal 36

timbang balik antara PT PWS dan PT Takara Golf Resort. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan tidak dapat menjadi dasar untuk kurator untuk melakukan pemutusan perjanjian sewa menyewa yang **masa sewa nya belum berakhir**. Demi terlaksanakannya kepastian hukum dan kepastian hukum atas perjanjian sewa menyewa tersebut, PT Takara Golf Resort tetap dapat memanfaatkan tanah milik debitor pailit atau PT PWS hingga masa sewa nya selesai yaitu pada tahun 2018.

Hal ini bertentangan dengan Pertimbangan Putusan Majelis Hakim PK . Putusan ini menguatkan Putusan Pengadilan Jakarta Pusat yang dalam putusannya, menyatakan bahwa kurator tidak melakukan kesalahan dalam menerapkan pasal 36 ayat (1) dan (3). Menurut majelis hakim, kepailitan adalah sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit, sehingga segala harta kekayaan pengurusan dan pemberesannya di lakukan oleh kurator. Kurator berhak melakukan pemutusan perjanjian sewa menyewa secara sepihak dengan syarat harus tetap memberi jaminan kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah PT Takara Golf yang akan dijadikan sebagai kreditor konkuren dan kurator memberi jaminan keistimewaan berupa dalam mendaftarkan tagihan, PT Takara Golf tidak terikat oleh jangka waktu pendaftaran yang telah ditetapkan kurator.

Pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Peninjauan Kembali No. 78Pk/Pdt.Sus-Pailit/2015 menjadi *tolak ukur mengenai* tafsiran Pasal 36 ayat(1) dan ayat(3) UU Kepailitan atas kewenangan Kurator untuk mengakhiri perjanjian Sewa menyewa, meskipun hal tersebut mempunyai

akibat hukum yaitu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, baik secara materiil maupun immateriil.

Akibat hukum dari pembatalan perjanjian timbal balik tersebut diatas, PT Takara Golf akan dijadikan sebagai Kreditor Konkuren. Hal ini tidak menjamin bahwa pihak ketiga sebagai penyewa tersebut akan mendapatkan pelunasan kerugian yang seharusnya diterima, hal ini dikarenakan objek tanah golf milik debitor pailit tersebut akan dibagi rata sesuai dengan jumlah piutang yang telah dicocokkan oleh kurator kepada masing-masing kreditor konkuren. Hal ini bertentangan dengan asas kepailitan *pari passu prorata parte*, prinsip ini menegaskan bahwa harta milik debitor pailit adalah jaminan untuk para kreditor dan hasil dari penjualannya harus dibagi secara proporsional diantara para kreditor bukannya dibagi secara sama rata seperti yang akan dilakukan kurator.

Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan juga pemberesan atas harta pailit. Pengurusan terjadi sejak debitor diputus pailit yang dalam prosesnya kurator tidak bebas melakukan sendiri seluruh kewenangannya. Ada beberapa kewenangan yang memerlukan persetujuan Hakim Pengawas.

Tugas dan kewenangan kurator sangat lah berat dan tidak sederhana. Dalam menjalankan tugasnya, kurator memerlukan keahlian dalam bidang keuangan dan bisnis serta dalam bidang hukum

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur tentang tanggung jawab kurator dalam melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit diantara nya :

1. Dalam Pasal 72 : Kurator harus bertanggung jawab atas kesalahan dan/atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pemberesan harta pailit yang dapat menyebabkan kerugian terhadap harta pailit
2. Pasal 78, ayat (1) : apabila kuasa atau izin diperlukan dan dalam hal ini jika tidak ada kuasa atau izin Hakim Pengawas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 dan Pasal 84, hal ini tidak akan mempengaruhi sah atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh kurator terhadap pihak ketiga.
3. Pasal 78 ayat (2) : terhadap perbuatan tersebut diatas, kurator sendirilah yang memiliki tanggung jawab terhadap debitor pailit dan kreditornya.
4. Pasal 98 : kurator harus melakukan upaya untuk mengamankan harta pailit debitor pailit dan menyimpan semua hal yang berhubungan dengan kepailitan seperti surat, uang, dokumen, perhiasan dan benda lainnya sejak pengangkatannya menjadi kurator.
5. Pasal 102 : setelah dilakukan pencatatan atas harta pailit, kurator harus membuat daftar yang berisi sifat piutang, jumlah piutang dan nama kreditor dan tempat tinggal serta jumlah piutang para kreditor.

Jadi kurator bukan hanya bertanggung jawab atas kesalahannya tetapi juga karena kelalaiannya. Karenanya Kurator haruslah melaksanakan

tugasnya secara hati-hati dan bertanggung jawab karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat mengajukan tuntutan atas kerugian atau atau kelalaiannya.⁵⁵ Hal ini diatur pada pasal 72 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004

“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”

Seringkali kurator tidak didukung SDM yang memadai guna melakukan penelitian terhadap laporan keuangan debitor pailit sehingga harta pailit pun tidak maksimal. Dalam beberapa perkara, kurator bahkan terkesan berseberangan dengan para kreditor dan cenderung berpihak pada debitor. Kurator sebagai salah satu tenaga profesional dalam pemberesan harta kepailitan selayaknya mendapat penjelasan yang pasti dalam UUK, khususnya berkaitan dengan tata cara penunjukan/pengangkatan kurator oleh Pengadilan Niaga.

Dengan kewenangan yang sangat luas, dia harus menjunjung tinggi prinsip transparansi dalam pengelolaan harta pailit. Jika kurator bertindak berlebihan, menyimpang dan terbukti merugikan kepentingan para kreditor maupun debitor pailit, Kurator dapat dimintakan pertanggung jawaban pribadi. Kurator dapat diberhentikan oleh Hakim Pengawas dan Kurator dapat digugat ke pengadilan.⁵⁶

⁵⁵ Timur Sukirno, **Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau PKPU**, dalam : Rudy A. Lontoh, dkk, Bandung: Alumni 2001, hlm. 369

⁵⁶ Benard Nainggolan, **Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-pihak Berkepentingan dalam Kepailitan**, Penerbit Alumni, Bandung, 2011 hlm. 50

Dengan mempertimbangkan pengaturan dalam UUK tersebut, kurator dapat mempunyai tanggung jawab baik pidana maupun perdata dalam menjalankan tugasnya, asalkan terdapat unsur kesalahan atau kelalaian dan bersifat melawan hukum.

Sebagai subyek hukum perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator dapat pula ditinjau berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Unsur-unsur Perbuatan melawan hukum menurut 1365 KUHPerdata adalah :

1. Adanya perbuatan

Perbuatan melawan hukum berawal dari perbuatan yang dilakukan pelaku. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang melawan hukum secara perdata, dapat berupa perbuatan secara aktif yaitu berbuat sesuatu maupun secara pasif yaitu dengan tidak berbuat sesuatu.

2. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Unsur persetujuan, kata sepakat dan unsur kausa yang diperbolehkan tidak ada dalam perbuatan melawan hukum, lain halnya dengan perjanjian atau kontrak. Suatu perbuatan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan UU dan juga melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan, dengan syarat memenuhi unsur-unsur :

- a. Perbuatan tersebut melanggar undang-undang;
- b. Perbuatan tersebut melanggar hak subyek hukum lain yang hak nya dijamin oleh undang-undang
- c. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku

- d. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma
- e. Perbuatan tersebut bertentangan dengan tindakan yang baik yang seharusnya dilakukan dalam masyarakat demi memperhatikan kepentingan orang lain.⁵⁷

3. Terdapat unsur kesalahan

Unsur kesalahan di dalam perbuatan melawan hukum terletak pada hati nurani pembuat kesalahan, jika ia pada waktu melakukan PMH dia tahu dan sadar jika perbuatannya tersebut akan menyebabkan kerugian bagi orang lain maka pembuat kesalahan dapat dimintai pertanggung jawaban.

Jika seorang kurator melakukan suatu kesalahan yang menyebabkan kerugian kepada debitor/kreditor, dapat di teliti dari aspek, apakah Kurator tahu dan sadar bahwa tindakannya dapat menyebabkan kerugian.

Apabila ia tahu bahwa ada kemungkinan jika tindakannya dapat menyebabkan kerugian kepada kreditor/debitor nya, maka sebelumnya ia telah melakukan penelitian dan menganalisa terlebih dahulu akibat dari perbuatannya itu. Apakah Kurator tahu bahwa tindakannya tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi kreditor/debitornya secara langsung

Pada Hukum Perdata tidak dibedakan pengertian kesengajaan dan kurang hati-hatian atau kelalaian seperti halnya yang diatur dalam Hukum Pidana. Perbuatan melawan hukum dalam 1365 BW hanya mengatur

⁵⁷ Munir Fuadi, **Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.11

harus ada kesalahan di pihak pembuat perbuatan melawan hukum, agar si pembuat itu dapat diwajibkan membayar ganti kerugian.

Maka dalam hukum perdata menurut KUHPerdata tidak perlu dibuktikan apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian.

Arti dari kesalahan yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah semua kesalahan dari mulai kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Suatu perbuatan dianggap mengandung unsur kesalahan jika ada unsur ;

- a) Kesengajaan
- b) Kelalaian
- c) Tidak adanya alasan pembenaran dan/atau pemaaf seperti *overmacht*

Terdapat tiga aliran terhadap perlunya unsur kesalahan disamping unsur perbuatan melawan hukum

- a) Aliran yang menyatakan cukup dengan unsur melawan hukum saja.

Dengan unsur melawan hukum dalam artinya yang luas, sudah termasuk unsur kesalahan didalamnya, sehingga tidak diperlukan unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum.

- b) Aliran yang menyatakan cukup hanya dengan unsur kesalahan saja

Aliran ini menyatakan jika dengan adanya unsur kesalahan, tidak perlu adanya unsur melawan hukum terhadap suatu perbuatan untuk dapat dikatakan melawan hukum.

- c) Aliran yang menyatakan diperlukan, baik unsur melawan hukum maupun unsur kesalahan

Aliran ini menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum harus dengan adanya unsur melawan hukum dan juga unsur kesalahan sekaligus, karena dalam teori ini dikemukakan bahwa dengan adanya unsur melawan hukum saja belum tentu memenuhi unsur kesalahan.⁵⁸

4) Adanya unsur kerugian

Kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum tidak hanya merupakan kerugian materiil atau uang saja namun dapat juga berupa kerugian imaretiil seperti moriil atau idiil, contohnya takut, sakit dan lain-lain. Rugi yang dimaksud disini berarti berkurangnya nilai kekayaan kreditur atau harta pailit.

Ganti rugi akibat wanprestasi meliputi tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan (bunga). Sedangkan unsur-unsur yang dipakai adalah uang. Dalam perbuatan melawan hukum, unsur-unsur kerugian dan ukuran penilaiannya dengan uang dapat diterapkan secara analogis. Dengan demikian penggantian kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan-

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 12

kemungkinan adanya tiga unsur tersebut dan kerugian dihitung dengan sejumlah uang.⁵⁹

5) Hubungan sebab akibat

Maksud dari sebab akibat disini adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan unsur kerugian yang ditimbulkan. Dengan adanya hubungan kausal disini, perbuatan si pelaku dapat dipertanggung jawabkan.

Bentuk kesalahan dan kelalaian kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit tidak dirumuskan dalam undang-undang kepailitan. Untuk dapat mengetahui unsur kesalahan atau kelalaian oleh kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, beberapa ahli hukum membuat beberapa batasan dalam perbuatan kurator yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, salah satunya adalah Munir Fuady.

Munir Fuady menyatakan bahwa dalam melakukan tindakannya, kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁶⁰

- a. Apakah kurator berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;
- b. Apakah perbuatan tersebut dilakukan pada saat yang tepat (secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan perbuatan tertentu;
- c. Apakah terhadap perbuatan tersebut diperlukan nya persetujuan/izin/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti contohnya dari pihak Pengadilan Niaga, hakim pengawas, debitor, panitia kreditor, dan lain-lain;

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 256

⁶⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti , Bandung, 1999, hlm. 5-6

- d. Apakah terhadap perbuatan tersebut perlu prosedur tertentu, seperti contohnya harus dalam sidang yang dihadiri oleh Hakim Pengawas atau harus dalam rapat tertentu, dan sebagainya;
- e. Apakah perbuatan tersebut memenuhi kelayakan dari segi hukum, norma kebiasaan dan norma social dalam melakukan perbuatan tertentu. Misalnya jika kurator akan menjual harta pailit tertentu, apakah harus melalui pengadilan lelang ataukah cukup dibawah tangan saja dan sebagainya.

Terkait tugas dan wewenang hakim pengawas, maka jika ada pihak-pihak baik debitor maupun kreditor yang menemukan kurator melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses kepailitan, maka pihak tersebut dalam rapat kreditor harus menyampaikan kepada Hakim Pengawas yang nantinya mengganti atau melakukan tindakan kepada kurator. Bila pihak tersebut ingin melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada kurator, harus diperhatikan beberapa hal, yaitu:

- a. Terpenuhi atau tidak unsur-unsur perbuatan melawan hukum
- b. Apakah masih terjadi dalam proses kepailitan
- c. Bagaimana pendapat dari hakim pengawas terhadap tindakan kurator apa rekomendasi yang diberikan oleh hakim pengawas

Jika dikaitkan dengan kasus diatas, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator telah dipenuhi sebagian, antara lain :

- 1) Adanya perbuatan yang dilakukan kurator berupa melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak.

Perbuatan tersebut melawan hukum yaitu bertentangan dengan pasal 36 Undang-undang Kepailitan mengenai pemutusan Perjanjian Sewa Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Kepailitan. Berdasarkan pasal 36 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, penafsiran hakim atas kalimat belum atau sebagian terpenuhi seharusnya tidak dimaknai sebagai belum selesainya masa sewa atau belum berakhir jangka waktunya, melainkan pada saat pelaksanaan kontrak tersebut, apakah telah selesai atau tidak prestasi diantara kedua belah pihak. Maka kurator tidak berhak mengakhiri perjanjian sewa menyewa atau perjanjian timbal balik antara PT PWS dan PT Takara Golf Resort. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan tidak dapat menjadi dasar untuk kurator untuk melakukan pemutusan perjanjian sewa menyewa yang masa sewa nya belum berakhir. Demi terlaksanakannya kepastian hukum dan kepastian hukum atas perjanjian sewa menyewa tersebut, PT Takara Golf Resort tetap dapat memanfaatkan tanah milik debitor pailit atau PT PWS hingga masa sewa nya selesai yaitu pada tahun 2018.

2) Adanya unsur kesalahan dari tindakan tersebut

Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesadaran dari Kurator dalam melakukan pemutusan perjanjian antara PT PWS dengan PT Takara Golf Resort. Hal ini dibuktikan dengan kurator yang mengajukan surat sebanyak dua kali, yaitu pemberitahuan atau somasi I dan pemberitahuan ulang.

Kesalahan juga dapat berupa kelalaian, dalam hal ini kelalaian yang dilakukan kurator dapat menyebabkan kerugian para kreditor dan tidak terpenuhinya seluruh hutang dari debitor pailit.

3) Adanya kerugian yang dialami oleh PT Takara Golf Resort

Adanya kerugian yang diderita Penggugat, yang dikemukakan dalam gugatannya, yaitu :

“Kewajiban menyerahkan SHGB Lahan Lapangan Golf sebelum masa sewa berakhir sehingga timbul Kerugian Materiil dengan total sebesar Rp97.317.500.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Yang dapat diperinci sebagai berikut :

- 1) Utang pada PT Tigaraksa (kreditur PT Takara Golf Resort) sejumlah Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah)
- 2) Sisa masa sewa selama 4 tahun sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), dengan perhitungan Net Profit per tahun Rp 4 miliar, sampai masa sewa berakhir 6 April 2018
- 3) 449 (empat ratus empat puluh sembilan) Refundable Membership dalam bentuk US\$ sebesar Rp61.737.500.000 (enam puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Refundable tersebut jatuh tempo sekitar 2017 dan 2018.

Kerugian Immateriil dengan tercemarnya nama baik Penggugat yang telah dibangun dan dijaga sejak dibukanya Lapangan Golf Takara sampai dengan saat ini oleh Penggugat dan tidak ternilai, jika dinilai dengan uang sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);”⁶¹

4) Adanya hubungan kausal

Hubungan kausal disini yang dimaksud adalah hubungan sebab akibat, tindakan kurator dalam melakukan pemutusan perjanjian dapat menyebabkan kerugian secara langsung yang diderita PT Takara Golf Resort.

Unsur-unsur diatas dapat menjadi salah satu dasar terlaksananya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pihak Kurator. Harta kekayaan

⁶¹ Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor 78 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 hlm. 10-11

debitur bukan hanya untuk menjamin kewajiban melunasi utang kepada kreditur yang diperoleh dari perjanjian utang piutang di antara mereka tetapi juga untuk menjamin semua kewajiban yang timbul dari perikatan debitur.⁶² Maka dari itu kewajiban pihak debitor pailit yaitu PT PWS dalam memperpanjang perjanjian sewa menyewa dengan PT Takara Golf harus dipenuhi meskipun dalam keadaan pailit

Kedudukan kurator sangat strategis karena jika dilihat dari kepailitan suatu perseroan, Kurator berkedudukan sama dengan Direksi Perseroan tersebut karena kurator menggantikan kedudukan Direksi perseroan setelah perseroan dinyatakan pailit.⁶³

Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan bahwa kurator mempunyai dua kewajiban hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, yang pertama adalah kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan kata lain kurator mengemban *Statutory duties* yaitu kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang. Kewajiban kedua adalah berupa *Fiduciary duties*, kurator mengemban *fiduciary duties* adalah kurator memiliki *fiduciary relationship* terhadap:

- a) pengadilan, yang dalam UUK-PKPU Indonesia diwakili oleh hakim pengawas;
- b) debitor;
- c) para kreditor, dan

⁶² Sjahdeini, Sutan Remy (2009). **Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan**. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. hlm. 50

⁶³ Benard Nainggolan, *Op.Cit*, hlm. 52

d) Para Pemegang Saham

Pengertian dari kurator memiliki *judiciary relationship* adalah kurator mengemban kepercayaan dari pengadilan, debitor, para kreditor, dan para pemegang saham. untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan para pihak tersebut. Dalam hubungannya dengan para kreditor, kurator menurut Andrew Keay bukan bertanggung jawab kepada kreditor secara individual, akan tetapi kepada seluruh kreditor dalam kesatuan. Andrew Keay berpendapat:⁶⁴

“Kurator selain perwakilan pengadilan dan dapat di percayai dengan mempertaruhkan reputasi pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya dengan tidak memihak.”

Berlakunya akibat kepailitan dan dimulainya proses kepailitan menjadi dasar bagi kurator mengambil alih kewenangan Direksi, pengalihan ini bukan atas perintah hakim pengawas tetapi karena peringah dari undang-undang. Pengalihan kewenangan ini tidak perlu dicantumkan pada putusan pernyataan peilitnya PT, tetapi memang demikian secara otomatis berlaku.

Peralihan kewenangan ini merupakan perubahan yang krusial dalam penyelenggaraan PT yaitu terjadinya peralihan kewenangan dari Direksi selaku organ perseroan yang selama ini bertindak untuk dan atas nama perseroan serta mewakili perseroan diluar dan dihadapan pengadilan kepada Kurator yang diangkat dalam putusan yang menyatakan pailitnya PT.

⁶⁴ Bernard Nainggolan, *Op. Cit.*, hlm. 70

Selama proses pailit, direksi tetap berwenang melakukan perbuatan hukum atas nama PT dan dapat melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya selama tidak mengakibatkan berkurangnya harta pailit dan tidak dilarang oleh UUK.

Direksi dibebani kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, kewajiban ini diikuti dengan pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian perseroan jika Direksi bersalah atau lalai melaksanakannya. Tugas dan pertanggungjawaban yang berat itu merupakan refleksi dari kepercayaan penuh pemegang saham kepada direksi atau yang disebut sebagai *Fiduciary Duty*, pelaksanaan tugas yang sesuai dengan keahliannya atau *Duty of Skill* dan pelaksanaan tugas menurut ketentuan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang atau *Duty of Statuta*.⁶⁵

Peralihan kewenangan direksi kepada kurator diikuti juga dengan tanggung jawab secara pribadi terhadap kesalahan atau kelalaiannya. Sehingga batasan terhadap perbuatan kurator yang melanggar hukum juga dapat di analogikan dengan doktrin dalam Hukum Perusahaan yaitu *ultravires*. Istilah *Ultra vires* artinya “diluar” atau juga “melebihi” kekuasaan

⁶⁵ Fred B.G Tumbuan, “*Tugas dan Wewenang Kurator Mengurus atau Membereskan Harta Pailit*” makalah disampaikan pada Seminar Sehari tentang Revitalisasi Tugas dan Wewenang Kurator/Pengurus, Hakim Pengawas dan Hakim Niaga dalam Rangka Kepailitan, Le Meridien Hotel, Jakarta 16 Oktober 2003

yaitu diluar kekuasaan yang diizinkan oleh hukum terhadap suatu badan hukum.⁶⁶

Pengaturan Ultravires mengandung arti bahwa perbuatan hukum tertentu jika dilakukan oleh manusia adalah sah, ternyata tidak sah apabila dikaitkan dengan maksud dan tujuan PT yang diatur dalam anggaran dasar PT.⁶⁷

Istilah ultra vires ini diterapkan tidak hanya jika perseroan melakukan tindakan yang sebenarnya dia tidak punya kewenangan, melainkan juga terhadap tindakan yang dia punya kewenangan, tetapi dilaksanakan secara tidak teratur (irregular). Bahkan lebih jauh lagi, suatu tindakan digolongkan sebagai ultra vires bukan hanya jika tindakan itu melampaui kewenangannya yang tersurat maupun tersirat, tetapi juga tindakannya itu bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan ketertiban umum.⁶⁸

Segala tindakan organ PT diluar kekuasaannya berdasarkan tujuan PT yang termuat dalam anggaran dasar akan dianggap batal demi hukum. Doktrin ini tidak hanya berlaku bagi tindakan PT yang melampaui kewenangannya atau ia tidak berwenang namun juga terhadap tindakan PT yang termasuk kewenangannya namun dilaksanakan secara tidak teratur. Dapat juga termasuk tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan kepentingan umum.

⁶⁶ Fred, B.G Tumbuan, **Pendirian Perseroan Terbatas dan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris serta Pihak Terkait Lainnya**, Seminar dengan Pendapat Publik Berkenaan dengan Perubahan Aspek Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta, 2001, hlm.201

⁶⁷ Misahardi Milatarma, **Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance**, Program Pasca Sarjana FHUI, 2005 hlm. 248

⁶⁸ Munir Fuady, **Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law (eksistensinya dalam Hukum Indonesia)**, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2002, hlm. 111

Suatu PT yang melakukan tindakan *ultra vires* yang melampaui kewenangannya, dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum.

Namun dapat terjadi juga jika suatu perbuatan yang tidak melampaui kewenangannya sebagaimana dalam kasus diatas adalah berupa pemutusan perjanjian timbal balik, namun menyebabkan beberapa kerugian dapat dikatakan sebagai *ultravires* dan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dalam perkara pailit kreditor berharap bahwa kurator sebagai pihak yang menggantikan tugas debitor dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, dapat bekerja secara maksimal agar tercapainya pengembalian aset atau *asset recovery*.

Sesuai dengan pasal 13 ayat 3 UUK, kurator yang diangkat harus independen dan tidak berbenturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Namun pada praktiknya masih ada beberapa kurator yang kurang maksimal dalam melakukan pengurusan dan pemberesan atas harta pailit.

Kurator memiliki *judiciary realtionship* untuk mengemban kepercayaan dari pengadilan, debitor, para kreditor dan para pemegang saham untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan pihak-pihak tersebut. Dengan kata lain kurator juga bertanggung jawab kepada pengadilan, debitor, para kreditor dan pemegang saham.⁶⁹

⁶⁹ Sutan Remi Sjahdeini, **Hukum kepailitan, Memahami Faillissement Verordening Juncto UU Nomor 4 Tahun 1998**, Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm.12-13.

Apabila direksi telah melanggar kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran dasar, maka direksi dapat dikatakan telah melanggar asas ultravires dan dengan demikian harus bertanggung jawab sampai harta pribadinya.

Pembatasan kewenangan direksi tercantum dalam UUPT antara lain

- 4) Pasal 2 : Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan juga kesusilaan.
- 5) Pasal 97 ayat (1) : Direksi melakukan pengurusan PT untuk kepentingan PT dan juga harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang tercantum dalam anggaran dasarnya.
- 6) Pasal 97 ayat (2) : pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.⁷⁰

Dalam pasal 97 ayat (5) UUPT dapat dikatakan bahwa :

“Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas setiap kerugian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) apabila dapat dibuktikan :

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya
2. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”⁷¹

⁷⁰ Zarman Hadi, **Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas**, UB Press, Malang, 2011, hlm. 87

⁷¹ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 97 ayat (5)

Pasal tersebut dapat ditafsirkan secara *a contrario* untuk membandingkan dengan tindakan perseroan yang dapat dikatakan sebagai *ultravires* dan dapat dipertanggungjawabkan.

- 1) Kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya.

Kesalahan juga dapat berupa kelalaian, dalam hal ini kelalaian yang dilakukan kurator dapat menyebabkan kerugian para kreditor dan tidak terpenuhinya seluruh hutang dari debitor pailit

- 2) Telah melakukan pengurusan dengan iktikad *tidak* baik dan juga tidak berhati hati demi kepentingan dan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas.

Iktikad tidak baik yang telah dilakukan Kurator dalam melakukan pemutusan perjanjian antara PT PWS dengan PT Takara Golf Resort. Hal ini dibuktikan dengan kurator yang mengajukan surat sebanyak dua kali, yaitu pemberitahuan atau somasi I dan pemberitahuan ulang.

- 3) Mempunyai benturan antar kepentingan baik secara langsung maupun tidak atas tindakan pengurusan yang dapat menyebabkan kerugian

Kurator dalam hal ini tidak memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai dengan prinsip kurator yaitu *indenpendensi*.

- 4) Tidak mengambil tindakan mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat, yaitu dengan timbul kewajiban untuk menyerahkan SHGB sebelum habisnya masa sewa menyewa sehinga menyebabkan kerugian materiil dengan total Rp.

97.317.500.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) juga kerugian immateriil yaitu pencemaran nama baik penggugat yang tidak ternilai, jika dapat dinilai dengan uang maka akan sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); Kurator tidak melakukan tindakan pencegahan maupun melakukan tindakan pertanggung jawaban dari kerugian yang diderita oleh Kreditor PT Takara Golf.

Dalam kasus diatas dan berdasarkan analisa yang dilakukan penulis, terlihat bahwa dalam pertimbangan nya, majelis hakim dalam putusan 658 PK/Pdt.Sus-Pailit/2014 dalam memutus kurator telah melakukan perbuatan hukum dapat dibenarkan ditinjau dari pasal 36 ayat bahwa kurator tidak berhak melakukan pemutusan hubungan perjanjian timbal balik karena dalam hal ini perjanjian telah selesai yaitu dengan telah di bayarkannya uang sewa oleh PT Takara Golf Ressor.

Perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum yaitu mengenai pemutusan Perjanjian berdasar pasal 36 UU Kepailitan dan PKPU, penafsiran hakim atas kalimat belum atau sebagian terpenuhi seharusnya tidak dimaknai sebagai belum selesainya masa sewa atau belum berakhir jangka waktunya, melainkan pada saat pelaksanaan kontrak tersebut, apakah telah selesai atau tidak prestasi diantara kedua belah pihak. Maka kurator tidak berhak mengakhiri perjanjian sewa menyewa atau perjanjian timbal balik antara PT PWS dan PT Takara Golf Resort. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan tidak dapat menjadi dasar untuk kurator untuk melakukan

pemutusan perjanjian sewa menyewa yang masa sewa nya belum berakhir. Demi terlaksanakannya kepastian hukum dan kepastian hukum atas perjanjian sewa menyewa tersebut, PT Takara Golf Resort tetap dapat memanfaatkan tanah milik debitor pailit atau PT PWS hingga masa sewa nya selesai yaitu pada tahun 2018.

Dalam kasus pada 658 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 dan 78 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 kurator telah memenuhi unsur unsur perbuatan melawan hukum yang ada pada pasal 1365 KUHPerdara. Namun karena tidak adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan maka hakim memiliki pendapat yang berbeda atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator. Dalam menjalankan tugasnya kurator memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang besar, Kurator dapat malah merugikan para pihak dan melakukan tindakan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau malah kurator dapat dengan mudahnya digugat ke pengadilan dengan dasar perbuatan melawan hukum yang ia lakukan. Maka dari itu, peneliti merasa sangat perlu untuk dibuatnya peraturan mengenai mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dengan mengisi kekosongan hukum atas PMH yang dilakukan kurator, dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum kepada kurator untuk dapat dikatakan bahwa ia telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Selain didasari oleh pasal 1365 KUHPerdara, dalam menentukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator dalam pengurusan dan

pemberesan harta pailit, salah satu batasannya dapat didasari oleh pendapat Munir Fuady, kurator dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, jika: kurator tidak berwenang untuk melakukan hal tersebut; tidak merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu; belum ada ijin/persetujuan dari pihak yang terkait dalam kepailitan; tidak sesuai dengan prosedur dalam Kepailitan; dan tidak sesuai dengan norma hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan tertentu.

Selain itu selama proses kepailitan, dikarenakan kurator memiliki tanggung jawab dalam perusahaan yang pailit sebagaimana direksi, maka baik wewenang maupun tanggung jawabnya dapat dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas, begitu pula dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator dapat ditinjau dari pasal 97 ayat (5) UUPT yaitu teori *ultravires*.

Berdasarkan penafsiran analogi dan *a contrario* atas pasal 97 ayat (5) UUPT, kurator dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian yang disebabkan dari hal-hal berikut ini : Kerugian tersebut terjadi karena kesalahan dan/atau kelalaiannya; Telah melakukan pengurusan dengan iktikad yang *tidak* baik dan tidak menggunakan kehati-hatian untuk kepentingan dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; Mempunyai benturan antar kepentingan baik langsung ataupun tidak langsung dalam tindakan pengurusan dan tindakannya tersebut mengakibatkan kerugian; dan Tidak

mengambil tindakan mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Ketiga tolak ukur ini berkaitan satu sama lain dan saling mendukung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa batasan perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator dalam pengelolaan dan pemberesan harta pailit adalah:

1. Kurator tidak berwenang untuk melakukan hal tersebut;
2. Tidak merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu;
3. Belum ada ijin/persetujuan dari pihak yang terkait dalam kepailitan;
4. Tidak sesuai dengan prosedur dalam Kepailitan
5. Tidak sesuai dengan norma hukum, kebiasaan dan sosial dalam menjalankan tindakan tertentu.

Selain hal di atas, berdasarkan penafsiran analogi dan *a contrario* atas pasal 97 ayat (5) UUPT, kurator dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian yang disebabkan dari hal-hal berikut ini :

1. Kerugian tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad *tidak baik* dan tidak melakukan kehati-hatian demi kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Perseroan
3. Mempunyai benturan antar kepentingan baik langsung maupun tidak atas tindakan pengurusan nya, dimana tindakan tersebut menyebabkan kerugian
4. Tidak mengambil tindakan mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut

Dalam kasus pada 658 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 dan 78 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 kurator telah memenuhi unsur unsur perbuatan melawan hukum yang ada pada pasal 1365 KUHPerdara. Namun karena tidak adanya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan maka hakim memiliki pendapat yang berbeda atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator. Perlu untuk dibuatnya peraturan mengenai mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dengan mengisi kekosongan hukum atas PMH yang dilakukan kurator, dapat memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan hukum kepada kurator untuk dapat dikatakan bahwa ia telah melakukan perbuatan melawan hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, saran yang dapat disampaikan adalah bahwa dalam menentukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator seharusnya dimasukkan ke dalam salah satu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga terciptanya kepastian hukum mengenai hal tersebut. Pasal tersebut dapat diadopsi dari beberapa teori salah satunya adalah pendapat Munir Fuady dan juga teori *ultravires*.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR

- Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul R. Saliman. 2005, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan**, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Adrian Sutedi, 2009 **Hukum Kepailitan**, Ghalia Indonesia, Bogor
- Benard Nainggolan, 2011, **Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-pihak Berkepentingan dalam Kepailitan**, Penerbit Alumni, Bandung.
- Burhan Ashshofi, 2010 **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta.
- CST. Kansil, 2002, **Pengantar Ilmu Hukum**, Balai Pustaka, Jakarta.
- Emmy Yuhassarie, 2005, **Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya**. Jakarta, Pusat Pengkajian Hukum
- Fred, B.G Tumbuan, 2001, **Pendirian Perseroan Terbatas dan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris serta Pihak Terkait Lainnya**, Seminar dengan Pendapat Publik Berkenaan dengan Perubahan Aspek Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta

- Imran Nating, 2004, **Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2005, **Teori Dan Metode Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003 **Pedoman Menangani perkara kepailitan**, Raja Grafindo Press, Jakarta
- M. Hadi Shubhan, 2007, **Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan)**, Surabaya
- M. Yahya Harahap, 1986, **Segi-segi Hukum Perjanjian**, Alumni, Bandung, 1986.
- Marjan Pane, **Permasalahan Seputar Kurator**, Makalah disampaikan dalam lokakarya “Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas : Tinjauan Kritis”, Jakarta 30-31 Juli 2002
- Mukti Fajar dan Yulianti Achmad, 2010, **Dualiseme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Munir Fuady, 2002 **Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law (eksistensinya dalam Hukum Indonesia)**, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- 2010, **Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek**, cetakan 4, PT Citra Aditya, Bandung.
- , 2013, **Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)**, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Misahardi Milatarma, 2005, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pasca Sarjana FHUI,
- Makalah Rosa Agustina, **Perbuatan Melawan Hukum**, FH Universitas Indonesia, Jakarta
- Rahayu Hartini, 2012 **Hukum Kepailitan**, Edisi revisi 3, UMM Press, Malang.
- Rosa Agustina, 2008, **Perbuatan Melawan Hukum**, FH Universitas Indonesia, Jakarta.
- Salim, H.S, 2005, **Pokok-Pokok hukum Perikatan dan Hukum Jaminan**, Liberty, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2009 **Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan**. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Sutan Remi Sjahdeini, 2002, **Hukum kepailitan, Memahami Faillissement Verordening Juncto UU Nomor 4 Tahun 1998**, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji 2013, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Timur Sukirno, 2001 **Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau PKPU**, dalam : Rudy A. Lontoh, dkk, Alumni, Bandung.

Zarman Hadi, 2011, **Karakteristik Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam Perseroan Terbatas**, UB Press, Malang.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Lembaran Negara Nomor 4443

